



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT KERJA
KOMISI VI DPR RI**

- Tahun Sidang : 2020-2021
Masa Persidangan : II
Jenis Rapat : Raker Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perdagangan
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Selasa, 8 Desember 2020
Waktu : 10.38 WIB – 12.52 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi VI DPR RI Gedung Nusantara I Lt.1
Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
Ketua Rapat : Mohamad Hekal, MBA, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI
Acara : Pembahasan mengenai:
1. Pengesahan protokol pertama, untuk mengubah persetujuan tentang kemitraan ekonomi menyeluruh antar negara-negara, anggota perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Jepang (*First Protocol to Amend The Agreement and Comprehensive Economic Partnership Among Member States Of The Association of Southeast Asian Nations and Japan*).
 2. Pengesahan persetujuan perdagangan referensial antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Mozambik (*Preferential Trade Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic of Mozambique*)
- Sekretaris Rapat : Dewi Resmi, S.E., M.Si., Kabag Sekretariat Komisi VI DPR RI
- Hadir : A. Anggota DPR RI:
35 dari 54 orang Anggota dengan rincian :
1. FRAKSI PDI-PERJUANGAN (F-PDIP)
10 dari 12 orang Anggota
 1. Aria Bima
 2. Gilang Dhielafararez, S.H.,LL.M
 3. Darmadi Durianto
 4. Rieke Diah Pitloka
 5. ST. Ananta Wahana,SH
 6. I Nyoman Parta, SH
 7. Ir. Deddy Yevri Hanteru Sitorus, MA
 8. Dr. Evita Nursanty, MSc
 9. Sondang Tiar Debora Tambubolon
 10. dr. H. Mufti A. N. Anam

2. FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG)
6 dari 8 orang Anggota
 1. Gde Sumarjaya Linggih, S.E.,M.A.P
 2. Ir. H. Mohamad Idris Laena
 3. Drs. Mukhtarudin
 4. H. Singgih Januratmoko, S.K.H., M.M
 5. Trifena M. Tinal, B.Sc
 6. Nusron Wahid

3. FRAKSI PARTAI GERINDRA (F-GERINDRA)
6 dari 7 orang Anggota
 1. Mohamad Hekal, MBA
 2. Andre Rosiade
 3. Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H
 4. Khilmi
 5. Ir. H. La Tinro Tunrung
 6. M. Husein Fadlulloh B.Bus.,M.M.,MBA

4. FRAKSI PARTAI NASDEM (F-NASDEM)
3 dari 5 orang Anggota
 1. H. Subardi, S.H., M.H
 2. Zuristyo Firmadata, S.E.,M.M
 3. Muhammad Rapsel Ali

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB)
5 dari 6 orang Anggota
 1. Faizol Riza, S.S
 2. Tommy Kurniawan
 3. Marwan Ja'far
 4. Drs. H. Mohammad Toha, S.Sos., M.Si
 5. Siti Mukaromah, S.Ag.,M.A.P

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)
1 dari 5 orang Anggota
 1. Hj. Melani Leimena Suharli

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS)
1 dari 4 orang Anggota
 1. Hj. Nevi Zuairina

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)
1 dari 5 orang Anggota
 1. Abdul Hakim Bafagih

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F-PPP)
2 dari 2 orang Anggota
 1. H. Ach. Baidowi, S.Sos.,M.Si
 2. Elly Rachmat Yasin

10. SEKRETARIAT JENDERAL

LEMBAGA NEGARA;
PEMERINTAH;
UNDANGAN YANG LAIN.

Jalannya Rapat:

KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A.):

(rekaman tidak lengkap) tahun 2020 tentang Tata Tertib, maka perkenankan saya membuka Rapat Kerja pada hari ini. Dan rapat saya nyatakan terbuka untuk umum. Setuju? Setuju ya.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.38 WIB)

Baik.

Terima kasih kami ucapkan kepada saudara Menteri Perdagangan atas kesediaan waktunya untuk menghadiri Raker pada hari ini. Sesuai dengan undangan yang telah kami sampaikan, agenda rapat pada hari ini adalah pembahasan mengenai :

1. Pengesahan protokol pertama, untuk mengubah persetujuan tentang kemitraan ekonomi menyeluruh antar negara-negara, anggota perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Jepang (*first protocol to amend the agreement and Comprehensive Economic Partnership among member states of the association of Southeast Asian Nations and Japan*).
2. Pengesahan persetujuan perdagangan referensial antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Mozambik (*Preferential trade agreement between The government of the Republic of Indonesia and The government of the Republic of Mozambique*).

Untuk itu, kami ingin mendapatkan persetujuan. Apakah rapat hari ini bisa kita akhiri pada pukul jam 1.15? Setuju ya.

(RAPAT:SETUJU)

Menyambung. *Online* ya.

Bapak dan Ibu hadirin yang kami muliakan,

Dapat kami informasikan bahwa, Presiden telah mengirim surat Nomor R50 Press 10 2019, tanggal 17 Oktober 2019, mengenai rencana pengesahan protokol pertama untuk mengubah persetujuan tentang kemitraan ekonomi menyeluruh antar negara-negara, anggota perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Jepang press protokol (*first protocol to amend the agreement and Comprehensive Economic Partnership among*

member states of the association of Southeast Asian Nations and Japan) kepada DPR RI.

Selanjutnya, dalam Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus DPR RI, antara Pimpinan DPR RI dan Pimpinan Fraksi melalui surat Nomor PW 19275 DPR RI 11, 2019, tanggal 21 November 2019, memutuskan menugaskan Komisi VI DPR RI untuk membahas ratifikasi tersebut bersama Pemerintah. Menindaklanjuti penugasan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah antara pimpinan DPR RI dan pimpinan rapat fraksi, eh, pimpinan fraksi tersebut. Komisi VI DPR RI pada tanggal 15 Januari 2020, memutuskan akan segera melaksanakan pembahasan pengesahan protocol, untuk mengubah persetujuan dana kemitraan ekonomi menyeluruh antara negara-negara anggota perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Jepang. Selain itu, Presiden RI telah mengirimkan Surat Nomor R07 Pres 02 2020, tanggal 10 Februari 2020 mengenai rencana pengesahan, persetujuan perdagangan preferensial antara Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Republik Mozambik (*Preferential Trade Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The government of the Republic of Mozambique*) kepada DPR RI.

Selanjutnya, dalam Rapat Bamus. DPR RI tanggal 26 Februari 2020, melalui surat PW 03726 DPR RI 2 2020, tanggal 26 Februari 2020, memutuskan menyetujui pembahasan ratifikasi dimaksud, diserahkan kepada Komisi VI DPR RI menindak (***suara terputus***) penugasan Rapat Badan Musyawarah DPR RI tersebut. Dalam Rapat *Intern* Komisi VI DPR tanggal 17 Juni 2020, telah disampaikan bahwa Komisi VI DPR RI menerima penugasan ratifikasi dan mengagendakan untuk melaksanakan Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan pemerintah, dengan agenda rencana pengesahan, rencana pengesahan, persetujuan perdagangan preference antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Republik Mozambik.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, Komisi VI ingin mendengarkan penjelasan Pemerintah, terhadap persetujuan pembahasan perjanjian perdagangan internasional dimaksud. Kepada yang terhormat, Saudara Menteri perdagangan kami persilahkan.

MENTERI PERDAGANGAN (AGUS SUPARMANTO):

Bismillahirrohmanirohim,

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Selamat Pagi dan salam sejahtera untuk kita semua,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam kebajikan.

Ketua dan Wakil ketua Komisi VI yang terhormat,
Bapak, Ibu Anggota Komisi VI yang terhormat.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah kami menyampaikan terima kasih kepada,

Bapak, Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi VI yang terhormat.

Atas undangan Rapat Kerja dalam rangka pengesahan protokol pertama untuk mengubah persetujuan tentang kemitraan ekonomi menyeluruh, ASEAN, Jepang atau Asian, Jepang. *Comprehensive Economic Partnership* dan persiapan, pengesahan, persetujuan Indonesia-Mozambik atau Indonesia- Mozambik *preferential trade agreement*.

Sebagaimana kita ketahui bersama, Presiden Republik Indonesia telah menyampaikan surat kepada ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Nomor : R07/Pres/02/2020 Tanggal 10 Februari 2020, perihal rencana pengesahan, persetujuan IM-PTA antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Mozambik, dan surat nomor R50/Pres/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019, perihal rencana pengesahan, *First Protocol to Amend The Agreement and Comprehensive Economic Partnership Among Member States of The Association of Southeast Asian Nations and Japan*.

Sebagai tindak lanjut, pada kesempatan ini. Izinkan lah kami memaparkan sekilas mengenai persetujuan IM-PTA untuk mendapatkan masukan atau rekomendasi dari

Bapak dan Ibu, Anggota Dewan yang terhormat.

Penyelesaian perundingan perdagangan internasional menjadi salah satu prioritas khusus Pemerintah saat ini terutama dalam menghadapi dampak pada pandemic Covid-19, yang menyebabkan kelemahan ekonomi dunia. Saat membuka Trade Expo Indonesia ke-35, pada tanggal 10 November 2020. Bapak Presiden mengingatkan kembali agar pasar non-tradisional dikembangkan dan digali dan perlu terobosan untuk meningkatkan ekspor ke negara non-tradisional. Untuk itu, terkait Indonesia-Mozambik PTA, pemerintah bersama dengan DPR RI, perlu segera menyelesaikan proses ratifikasi perjanjian perdagangan internasional, yang telah ditandatangani Agustus 2019 lalu, antara ke dua negara. Persetujuan kemitraan ekonomi menyeluruh ASEAN-Jepang atau ASEAN-Japan *Comprehensive Economic Partnership*, juga menjadi salah satu perjanjian yang perlu diimplementasikan segera, agar para pelaku usaha dapat memanfaatkannya untuk meningkatkan perdagangan dan investasi.

Bapak Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR RI yang saya hormati.

Berkaitan dengan surat undangan Ketua DPR RI, maka pada kesempatan yang baik ini. Izinkanlah kami menyampaikan paparan mengenai ASEAN-Japan CEPA dan Indonesia-Mozambik PTA. Persetujuan kemitraan ekonomi menyeluruh ASEAN-Jepang, *The First Protocol to Amend the Asian-Japan Comprehensive Economic Partnership*.

Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi VI yang terhormat.

AJCEP sebagai payung hukum utama perjanjian perdagangan bebas, antara ASEAN-Jepang telah ditandatangani oleh, dan ditandatangani pada tanggal 31 Maret 2008 di Jakarta. Dan Indonesia telah meratifikasi

persetujuan AJCEP tersebut melalui, penerbitan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2009, tanggal 19 November 2009.

The first protocol to amend AJCEP, merupakan perjanjian pertama, yang merubah perjanjian AJCEP yang sebelumnya baru mencakup elemen perdagangan barang. Protokol ini bertujuan untuk memasukkan 3 bab baru, terkait perdagangan jasa *movement of natural person*, dan investasi ke dalam perjanjian AJCEP. Secara umum, bab perdagangan jasa terdiri dari 26 Pasal, yang mencakup topik antara lain : akses pasar, pengaturan spesifik, dan transparansi. Serta terdapat dua lampiran yaitu, terkait pengaturan di sektor jasa keuangan sebanyak 6 pasal dan pengaturan di sektor jasa telekomunikasi sebanyak 18 pasal.

Selanjutnya, bab *movement of natural person* terdiri dari 10 pasal, yang mengatur antara lain, proses aplikasi, transparansi, dan komitmen spesifik untuk investasi terdiri dari 23 pasal. Mengatur antara lain : peningkatan iklim investasi di negara-negara ASEAN dan Jepang melalui promosi, proteksi dan fasilitasi investasi. Protokol ini ditandatangani oleh seluruh Negara Anggota ASEAN dan Jepang, pada tanggal 24 April 2019 di Hanoi, Vietnam, secara referendum. Dan akan mulai berlaku efektif pada hari pertama, pada bulan ke. Setelah Jepang dan setidaknya satu negara anggota ASEAN, menyampaikan notifikasinya kepada Sekretariat ASEAN. Saat ini Thailand, Singapura, Laos, Myanmar, Vietnam, Brunei Darussalam, dan Jepang telah menyelesaikan proses ratifikasi nya. Dan protokol ini telah berlaku efektif, entry into force pada 1 Agustus 2020.

Pimpinan dan Anggota Komisi VI yang terhormat.

Sejak Indonesia mengimplementasikannya, pemanfaatan perjanjian aja dapat dilihat dari penggunaan surat keterangan asal form aja, yang terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2018, jumlah lembar SK yang diterbitkan oleh Indonesia sebanyak 11.129 lembar dengan nilai perdagangan sebesar USD 753,85 Juta pada tahun 2019, meningkat menjadi 14.282 lembar dengan nilai transaksi sebesar USD1, 62 Miliar.

Dengan semakin meningkatnya kinerja perdagangan Indonesia, melalui implementasi aja, kami optimis AJCEP dapat menjadi salah satu solusi dalam mengurangi defisit perdagangan non-migas Indonesia dengan Jepang. Di samping melalui skema AJCEP, Indonesia dan Jepang juga memiliki kerjasama FTA secara bilateral AJCEP, IJ-EPA.

Melalui skema bilateral ini, pada tahun 2018 pemanfaatan form IJ-EPA oleh Indonesia ekspor sebanyak 8086, 80.652 lembar, dengan nilai transaksi sebesar 7,28 miliar US Dolar. Pada tahun 2019 sebanyak, 74, 74.766 lembar dengan nilai transaksi sebesar 5,87 miliar US Dollar. Kedua perjanjian ini, bersifat saling melengkapi atau komplementer dengan persetujuan AJCEP dengan memberikan nilai tambah tersendiri. Dalam proses produksi suatu barang misalnya, suatu pihak kini dapat memanfaatkan bahan baku yang berasal dari seluruh pihak AJCEP, dengan ketentuan produk akhir memiliki nilai kandungan regional setidaknya 40%, dan dapat diklaim sebagai barang negara yang memproduksinya tersebut.

Persetujuan AJCEP dan protokol perubahan ini tentunya dilakukan dengan mempertimbangkan, anti penting Jepang bagi perekonomian negara-negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia. Jepang merupakan negara

mitra dagang yang sangat strategis bagi ASEAN, maupun Indonesia. Dalam hal perdagangan barang, Jepang merupakan negara mitra dagang terbesar ketiga bagi ASEAN, dan terbesar kedua bagi Indonesia.

Dari sisi perdagangan jasa, eh sektor jasa, memberikan kontribusi yang sangat besar bagi perekonomian Jepang, yaitu sebesar 71,6% pada tahun 2016, dimana sektor jasa konstruksi, teknologi informatika, transportasi dan perdagangan merupakan sektor utama. Dalam kaitan tersebut, sektor-sektor jasa dari Indonesia memiliki peluang untuk memasuki pasar jasa Jepang, diantaranya pada sektor-sektor yang kami sebutkan tadi.

Dalam hal investasi, sebagaimana diuraikan di atas. Jepang merupakan negara investor terbesar ketiga bagi ASEAN, sementara bagi Indonesia adalah terbesar kedua setelah Singapura, dengan nilai investasi sebesar USD 4,95 Miliar pada tahun 2018. Selama tahun 2013 sampai 2018, tercatat mulai, total nilai investasi Jepang ke Indonesia mencapai USD 23,08 Miliar.

Analisa SWOT dan produksi ekspor impor dan jasa dengan implementasi *the first protocol to amend the AJCEP*.

Bapak dan Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi VI yang saya hormati

Selanjutnya, izinkanlah kami menyampaikan hasil analisa SWOT dan pronoksa yang telah kami lakukan bersama dengan Institut Pertanian Bogor dan para peneliti internal Kementerian Perdagangan, sebagai bahan pendukung atau pertimbangan dalam proses pengesahan protokol ini.

Pertama analisa SWOT, khususnya terkait kekuatan yang dimiliki Indonesia dan oportunitas yang dapat diperoleh Indonesia. Dengan implementasinya protokol ini, pada perdagangan jasa dan MNP. Dapat kami sampaikan, bahwa berdasarkan hasil kajian SWOT tersebut, nilai *strength* lebih besar daripada nilai *weakness* yaitu 1,5 lebih besar, antara 1,5 dan 1,1. Hal ini berarti, Indonesia secara *internal* dipandang memiliki kekuatan dalam menghadapi implementasi protokol ini. Dengan faktor internal tersebut adalah, jumlah populasi Indonesia yang mencapai lebih dari 260 juta jiwa dan daya saing yang dimiliki oleh Indonesia di sektor jasa pariwisata dan jasa kesehatan dibandingkan dengan Jepang.

Sementara untuk faktor eksternal, hasil kajian analisa SWOT juga menunjukkan bahwa, nilai *opportunity* lebih besar dari nilai *threat* yaitu, 0,7 sampai 2,01. Hal ini berarti, implementasi protokol dipandang akan lebih banyak memberikan peluang atau *opportunity* bagi Indonesia, daripada potensi ancaman atau *threat* yang akan muncul. Secara total, akademisi menghitung bahwa total faktor internal yaitu 2,5, sementara total faktor eksternal yaitu 2,9.

Dengan demikian, berdasarkan analisa SWOT, respon Indonesia terhadap implementasi protokol ini berada pada posisi SDO yang artinya Indonesia memiliki kekuatan dan sekaligus peluang. Adapun faktor terbesar yang menjadi peluang tersebut adalah, adanya pengakuan sertifikasi nasional Indonesia di pasar Jepang, dan terbukanya akses pasar industri jasa Jepang.

Sementara itu, terkait kajian pronogsa, perdagangan jasa dan MNP dapat kami sampaikan bahwa, perdagangan jasa antara Indonesia dan Jepang selama periode 2013-2018, menunjukkan dinamika perubahan dimana pada tahun-tahun terakhir periode tersebut terlihat adanya peningkatan nilai perdagangan. Secara merata, Indonesia mengekspor 44%

sektor jasa ke Jepang dan mengimpor sekitar 56% sektor jasa dari Jepang. Dan dari tahun 2016 hingga 2018, ekspor jasa Indonesia ke Jepang terus mengalami peningkatan, khususnya untuk sektor jasa transportasi dan sektor jasa bisnis lainnya.

Sementara dari sisi impor, Indonesia masih mengimpor sektor jasa telekomunikasi komputer dan informasi, serta sektor jasa keuangan dari Jepang. Dimana sektor-sektor jasa yang disediakan Jepang tersebut, memang terbilang cukup memiliki daya saing yang tinggi. Komitmen Jepang yang lebih terbuka dibandingkan komitmen Indonesia. Sebagaimana disampaikan sebelumnya, memberikan peluang yang lebih baik bagi peningkatan ekspor jasa Indonesia. Akademi memproyeksikan bahwa, secara akumulatif nilai ekspor jasa Indonesia ke Jepang diproyeksikan akan terus meningkat, terutama di sektor transportasi udara dan laut. Sektor pendukung jasa transportasi, asuransi dan konstruksi. Protokol ini membuka peluang adanya peningkatan nilai ekspor menjadi senilai 629,8 Juta, 629,8, 729,3 dan USD 891,9 Juta.

Sementara, bila tanpa adanya protokol ini, nilai ekspor jasa di tahun 2020, 2022 dan 2025, secara berturut-turut hanya mencapai 584,4 Juta, 678,1 Juta, dan USD 831,6 Juta. Pertumbuhan nilai ekspor jasa ini diproyeksikan terjadi pada sektor jasa transportasi darat, laut dan udara, sektor jasa bisnis lainnya, dan sub sektor jasa asuransi.

Bersamaan dengan itu, proyeksi nilai impor jasa Indonesia dari Jepang juga akan mengalami peningkatan, di mana dengan AJCEP akan terjadi penurunan tingkat pertumbuhan nilai impor pada periode 2020-2025. Pada akhir pada periode ini, dengan mengimplementasikan protokol AJCEP terdapat potensi nilai impor yaitu USD 864,6 Juta, lebih kecil dari nilai ekspornya yaitu USD 891,9 Juta. Sementara, tanpa protokol AJCEP nilai impor senilai USD 857,6 Juta, akan lebih besar daripada nilai ekspornya, senilai USD 831,6 Juta.

Selanjutnya, izinkanlah kami menyampaikan hasil analisis SWOT (***suara terputus-putus***) terkait isu investasi, apabila Indonesia mengesahkan protokol ini. Pada bidang investasi, hasil kajian analisa SWOT menunjukkan skor sebesar 4,06 untuk faktor internal, yang menunjukkan bahwa Indonesia secara internal dipandang lebih memiliki kekuatan, dalam menghadapi implementasi protokol ini. Faktor utama internal tersebut adalah jumlah populasi Indonesia yang besar, yang akan menjadi faktor bagi investor asing untuk investasi di Indonesia. Dan telah terdapatnya peraturan dalam negeri dalam hal jaminan hukum terhadap investasi asing. Sementara, untuk faktor eksternal hasil kajian analisis SWOT juga menunjukkan skor sebesar 4,2 untuk faktor eksternal. Berada di atas rata-rata skor 3,5, yang menunjukkan bahwa Indonesia secara eksternal juga memiliki peluang atau *opportunity* bagi Indonesia daripada potensi ancamannya, *threat* yang akan muncul. Adapun faktor terbesar yang menjadi *opportunity* tersebut adalah potensi peningkatan investasi dari Jepang ke Indonesia, dan pelaku investor Jepang yang akan melakukan investasi secara langsung atau tidak melalui perantara.

Selanjutnya, terkait proyek kinerja investasi. Dapat kami sampaikan bahwa, *trend* nilai investasi Jepang di Indonesia pada periode 2016-2019, relatif menunjukkan peningkatan, dengan puncaknya pada tahun 2016, sebesar USD 5,4 Miliar Berdasarkan sebaran lokasinya, investasi Jepang mayoritas berada di provinsi Jawa Barat, dan Jawa Tengah.

Dan juga berdasarkan sektor, investasi Jepang tertinggi berada pada sektor industri kendaraan bermotor dan alat transportasi lainnya untuk periode 2010 sampai 2017. Dan bergeser ke sektor energi listrik, gas dan air pada tahun 2017-2018. Jepang merupakan negara investor terbesar ke-2 bagi Indonesia selama 3 tahun berturut-turut, sejak tahun 2016, setelah Singapura dan diikuti oleh Republik Rakyat Tiongkok, Malaysia dan Hongkong.

Berdasarkan kajian *prognosign*, implementasi pada *the first protocol to amend AJCEP* ini, akan meningkatkan nilai investasi Jepang ke Indonesia sebesar 3 sampai 5% hingga tahun 2024, dengan nilai total investasi mencapai 6,25 miliar US Dollar. Guna mendukung hal ini, Pemerintah juga terus berupaya dalam meningkatkan sumber investasi segar bagi Indonesia, antara lain, melalui perbaikan berbagai kebijakan seperti penerapan *Online Single Submission* atau OSS yang bertujuan mempermudah akses izin usaha termasuk penanaman modal di Indonesia, serta pemberian *tax holiday* dalam upaya menarik investasi.

Bapak, Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi VI yang kami hormati.

Terkait elemen perdagangan jasa dalam protokol ini, perkenankanlah kami menanggapi beberapa pertanyaan yang diajukan. Khususnya penjelasan terkait sub sektor, sub sektor yang di-komitmen-kan Indonesia dan Jepang, langkah konkrit yang memanfaatkannya dan mitigasi dampak negatif yang akan timbul.

Gambaran komitmen Jepang dan Indonesia. Dalam protokol ini, Jepang mengkomitmenkan 12 sektor jasa, seratus (***suara terputus***) tujuh sub sektor. Sementara, Indonesia mengkomitmenkan 11 sektor jasa, 48 subsektor. Adapun sektor-sektor tersebut sebagai berikut :

12 (dua belas) sektor jasa yang akan dibuka Jepang:

1. adalah bisnis *service*,
2. *Communication services*,
3. *Construction engineering services*,
4. *Distribution service*,
5. *Education services*,
6. *Environmental service*,
7. *Financial Services*,
8. *Health and Social Services*,
9. *Tourism and travel related Services*,
10. *Recreational Culture and Sport Sservices*, dan
11. *Transport Service*,
12. *ada Services not including as well.*

11 (sebelas) sektor jasa yang dibuka Indonesia:

1. *Bisnis service*,
2. *Communications Services*,
3. *Construction dan related services*,
4. *Distribution service*,
5. *Education services*,
6. *Environmental service*,
7. *Financial Services*,

8. *Health and related social Services,*
9. *Tourism and travel related Services,*
10. *Transport service,*
11. *ada Services not including elsewhere*

Secara rinci, perbandingan komitmen Indonesia dan Jepang dalam sub sektor-sub sektor jasa adalah sebagai berikut, dengan terbukanya 147 sub sektor jasa Jepang, Indonesia berpotensi untuk dapat masuk ke pasar jasa Jepang. Khususnya, bagi sektor-sektor yang menjadi unggulan Indonesia. Berdasarkan kajian *roadmap* perdagangan jasa, dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas ekspor tahun 2016-2020, sektor jasa yang berperan paling signifikan terhadap peningkatan ekspor, baik sebagai *enabler* terhadap industri non-migas, maupun sebagai *input* dalam jejaring jasa itu sendiri adalah sektor jasa distribusi, jasa transportasi dan jasa pariwisata.

Berdasarkan kajian yang akademisi lakukan, protokol ini secara kumulatif dapat meningkatkan nilai ekspor jasa Indonesia ke Jepang di tahun 2025, mencapai USD 891,8 Juta jauh lebih besar bila protokol ini tidak diimplementasikan, diimplementasikan dimana ekspor jasa hanya akan mencapai USD 831,6 Juta. Meski akademisi memperkirakan bahwa, impor jasa Indonesia dari Jepang juga akan terus meningkat. Namun, pertumbuhan peningkatan impor ini akan melambat, sehingga neraca perdagangan jasa Indonesia diperkirakan akan *surplus* pada tahun 2025.

UMKM juga diyakini akan menerima manfaat dari adanya AJCEP ini, sebab masuknya penyedia jasa Jepang juga akan diikuti dengan adanya peningkatan kapasitas. Selain itu, khusus untuk modal 3, *commercial reasons*. Penyedia jasa Jepang harus bermitra dengan penyedia jasa local, dengan kepemilikan modal mayoritas dimiliki oleh penyedia jasa lokal. Dalam memanfaatkan protokol ini, pemerintah akan meningkatkan daya saing penyedia jasa Indonesia di berbagai subsektor jasa. Yang merupakan kekuatan Indonesia antara lain, pada sektor jasa transportasi, asuransi, pariwisata, dan konstruksi.

Mendorong masuknya investasi asing di subsidi sektor jasa, tetap harus bekerjasama dengan penyedia jasa lokal, agar terjadi alih pengetahuan dan alih teknologi kepada penyedia jasa dalam negeri. Penguatan regulasi nasional, dalam menjaga penyedia jasa nasional, penyebaran informasi terkait peluang perjanjian AJEP, AJCEP. Kementerian Pertahanan membentuk *FTA center*, dengan tenaga profesional dalam mendesainisasikan setiap perjanjian perdagangan bebas, termasuk peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha Indonesia.

Disamping itu, masuknya penyedia jasa Jepang di Indonesia dapat turut mendorong partisipasi Indonesia dalam *global value chances*, yang dapat berperan dalam mendorong peningkatan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan standar hidup. Di saat yang bersamaan, tantangan juga akan dihadapi khususnya, kemungkinan terjadinya kompetisi antara penyedia jasa Indonesia, dengan penyedia jasa dari negara ASEAN, untuk memasuki pasar Jepang. Dan kompetisi antara penyedia jasa Jepang dengan penyedia jasa lokal.

Kesiapan Indonesia dalam menghadapi implementasi dan *first protocol to amend the AJCEP* bab MNP, pemerintah akan memastikan peningkatan *law enforcement* di bidang jasa oleh tim pora (pengawasan orang asing) yang

melibatkan kepentingan Lembaga, sebagai amanat Undang-Undang imigrasi Nomor 6 Tahun 2011. Berdasarkan Permen hukum dan Ham nomor 50 tahun 2016, untuk melakukan pengawasan terhadap tenaga kerja asing yang dalam persetujuan ini hanya untuk kategori bisnis visitor dan kategori ICT yaitu jabatan eksekutif *manager* kecuali, *manager* personalia dan spesialis di Indonesia. Dan memastikan, seluruh Tenaga Kerja Asing dari Jepang dan negara ASEAN lainnya yang masuk ke Indonesia, telah melalui, melalui mekanisme ekonomi mid tes.

Satu hal yang tidak kalah penting, Tenaga Kerja Indonesia memiliki peluang yang cukup besar untuk bisa mengakses pasar tenaga kerja di Jepang untuk 6 kategori yaitu, pengunjung bisnis, *intra corporate transferee*, investor, profesional yang terkait dengan bidang yang membutuhkan teknologi atau pengetahuan pada tingkat *advance*, tenaga kerja yang bergerak pada jasa profesional seperti, jasa liga, akuntan, auditor, perpajakan, serta pendamping dan anak dari kategori-kategori dimaksud.

Pemberlakuan protokol ini, berpotensi meningkatkan aliran investasi Jepang ke Indonesia yang juga dapat menyerap Tenaga Kerja dan bahan baku nasional, meningkatkan proses alih teknologi, serta meningkatkan daya saing nasional. Agar hal ini terwujud, rezim peraturan perUndang-Undang Indonesia yang pro investasi, yang juga pro rakyat terus diupayakan oleh pemerintah. Hal ini antara lain, dilakukan dengan memastikan implementasi Perpres Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Agar koordinasi pelaksanaan investasi antara pusat dan daerah dapat lebih kuat dan sinergi. Memastikan operasionalisasi *one single submission* atau OSS, dalam hal meningkatkan fasilitasi perizinan investasi. Mewujudkan regulasi yang pro investasi seperti, RUU Cipta Lapangan Kerja dan RUU Perpajakan yang direncanakan pemerintah. Meningkatkan kegiatan promosi dan fasilitasi investasi, dan meningkatkan kualitas SDM, melalui perbaikan sistem pendidikan formal dan vokasi, serta pelatihan bagi tenaga kerja terampil. Mengefektifkan kinerja Satgas percepatan dan efektifitas, pelaksanaan kebijakan ekonomi Pokja 4 yang dikoordinasikan oleh Kemenko Perekonomian. Meningkatkan sosialisasi kebijakan rezim investasi Indonesia, dan komitmen Indonesia dalam perjanjian internasional ke seluruh pemerintah daerah. Pengaturan bidang investasi, dalam protokol ini memuat prinsip-prinsip yang mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif bagi pelaku usaha. Apabila penyusunan kebijakan bidang investasi telah selaras dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam pengaturan bidang investasi, maka diharapkan protokol akan menarik minat oara investor dari negara-negara yang termasuk dalam kerjasama ASEAN-Jepang untuk menanamkan investasinya di Indonesia.

Berdasarkan hasil presentasi kami, Izinkanlah kami menyimpulkan hal-hal terkait *first protocol to amend the AJEP, AJCEP*. Pertama adalah payung hukum perjanjian perdagangan bebas ASEAN-Jepang *Comprehensive Economic Partnership*, telah diratifikasi oleh Indonesia melalui penerbitan Perpres Nomor 50 Tahun 2009, diperlukan penerbitan peraturan perundang-undangan yang bersifat fleksibel terhadap amandemen persetujuan AJCEP di masa mendatang, mengingat perjanjian AJCEP yang bersifat dinamis dan

memerlukan amandemen dalam menjawab setiap tantangan perubahan rezim perdagangan dunia.

Protokol ini akan memberikan manfaat yang cukup besar bagi Indonesia, baik dalam perdagangan, jasa, MNP dan investasi sebagai hasil kajian SWOT dan pronoksa. Protokol ini tidak menimbulkan akibat yang luas dan mendasar, bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan atau mengharuskan perubahan atau pembentukan Undang-Undang. Protokol ini telah berlaku efektif sejak 1 Agustus 2020, kecuali untuk Indonesia, Malaysia, Filipina dan Kamboja, dan mendesak para pihak lainnya untuk segera menyelesaikan ratifikasi protokol ini. Indonesia dipandang sangat perlu untuk dapat segera mengesahkan protokol ini. Sehingga, dapat segera memanfaatkan berbagai peluang yang telah dikomitmenkan oleh seluruh negara anggota ASEAN dan Jepang.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, dan mempertimbangkan dasar hukum pemberlakuan persetujuan, persetujuan AJCEP adalah melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2009, kami mohon kiranya

Bapak dan Ibu Anggota Komisi VI yang terhormat,

Dapat mempertimbangkan untuk menyetujui pengesahan *first protocol to amend the AJCEP* melalui penerbitan Peraturan Presiden.

Bapak dan Ibu Pimpinan, dan Anggota Komisi VI yang saya hormati,

Berdasarkan hasil presentasi AJCEP di atas, sebagai kelanjutan Rapat Kerja Menteri Perdagangan dengan Komisi VI DPR RI, tanggal 30 Januari 2020 yang telah dibahas secara detail dan jawaban atas pertanyaan Bapak dan Ibu Anggota Komisi telah kami sampaikan secara tertulis. Maka, ijinlah kami menyebutkan bahwa *the first protocol to amend AJCEP*, satu adalah payung hukum perjanjian perdagangan bebas ASEAN-Japan *Comprehensive Economic Partnership* telah diratifikasi oleh Indonesia melalui penerbitan Perpres Nomor 50 Tahun 2009. Protokol ini tidak menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat, yang terkait dengan beban keuangan negara dan atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang. Dan protokol ini telah berlaku efektif sejak 1 Agustus 2020 kecuali Indonesia, Malaysia, Filipina dan Kamboja, dan mendesak para pihak lainnya untuk menyelesaikan ratifikasi protokol pada bulan November 2020.

Bapak dan Ibu pimpinan Komisi VI yang saya hormati,

Persetujuan IM-PTA ini, inisiasi pada pertemuan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dan Presiden Mozambik Filipe Jacinto Nyusi, tanggal 7 Maret 2017 di sela-sela KTT, *Indian Ocean Rim Association* di Jakarta. Sebagai tindak lanjut, dan setelah melakukan berbagai persiapan *internal*, pada tanggal 11 April 2018, kedua negara meluncurkan perundingan IM-PTA melalui pernyataan bersama atau *joint statement* antara menteri perdagangan kedua negara, pada saat Indonesia-Afrika forum di Bali. Perundingan IM-PTA dapat dikatakan perundingan yang paling cepat diselesaikan, karena hanya memerlukan 3 putaran dalam tenggang waktu 1 tahun.

IM-PTA ditandatangani pada tanggal 27 Agustus 2019, Maputo, Mozambik, dan menjadi catatan sejarah bagi kedua negara. Karena hal ini merupakan perjanjian dagang pertama bagi Indonesia dengan negara-negara Kawasan Afrika dan merupakan perjanjian pertama Mozambik dengan negara-negara Asia. Perjanjian ini berbentuk PTA dan hanya mencakup pengaturan perdagangan barang yaitu pemberian referensi untuk pengurangan atau penghapusan tarif, mengatur aturan non tarif, mekanisme *safeguard*, serta ketentuan asal barang dan prosedur kepabeanan.

Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR RI yang saya hormati,

Mungkin banyak yang bertanya, mengapa Mozambik. Mozambik merupakan negara yang sedang berkembang atau *emerging economy* yang terletak di bagian Tenggara, benua Afrika dengan luas wilayah hampir 800.000 km², jumlah penduduk sebanyak 30,37 juta jiwa, produk domestik bruto Mozambik sebesar USD 15,21, USD 15,21 Miliar dengan pertumbuhan 2,2% pada tahun 2019. PDB per kapita Mozambik adalah USD 539,2 sementara nilai perdagangan luar negeri Mozambik tercatat USD 12,35 Miliar dimana ekspor mencapai USD 4,72 Miliar dan impor USD 7,63 Miliar. Ini menjadikan Mozambik sebagai negara 20 besar eksportir ke dunia, dari 54 jumlah negara di kawasan Afrika.

Ekspor utama Mozambik pada tahun 2019 adalah batu bara 21, 52% dari total ekspor, aluminium 19,91%, energi listrik 9, 21%, bahan bakar gas 5,74% dan tembakau adalah 4, 88%. Sementara impor utama Mozambik adalah bahan bakar minyak 15,2%, dari total impor chloride 3,87%, beras 3,4%, kendaraan bermotor pengangkut barang 3%, dan gandum sereal di 2,59%.

Mozambik memiliki perjanjian perdagangan dengan negara-negara di kawasan Afrika melalui *African Economic Community*, *Southern African Development Community* dan *African continent free trade area*. Selain itu, FTA dengan Uni Eropa dan penerima preferensi *duty-free*, secara unilateral dan dari beberapa negara maju termasuk Uni Eropa, Amerika Serikat dan Jepang melalui program, *Global system of preferences* atau di GSTV. Mozambik dan Indonesia juga sama-sama menjadi anggota *World Trade Organization*, *Organization of Islamic Corporation*, *Indian Ocean Rim Association*, dan SABC, dimana Indonesia adalah sebagai *observer*.

Pada tahun 2019, total nilai perdagangan Indonesia dan Mozambik mencapai 149,32 Juta, dengan ekspor Indonesia ke Mozambik sebesar USD 129,71 Juta. Impor sebesar USD 19,61 Juta dan *surplus* bagi Indonesia sebesar USD 110,10 Juta. Selama periode 2015-2019, total perdagangan Indonesia dan Mozambik mengalami tren kenaikan sebesar 12,42%. Pada periode yang sama, pada periode yang sama ekspor Indonesia ke Mozambik mengalami tren kenaikan sebesar 10,73% dan impor naik juga dengan tren sebesar 16,51%. Produk ekspor utama Indonesia ke Mozambik pada tahun 2019 adalah minyak kelapa sawit sebesar USD 71,42 Juta, asam lemak monokarboksilat industri sebesar USD 10,82 Juta, sabun USD 10,74 Juta kertas dan kertas karton tidak dilapisi sebesar USD 2,7 juta, bahan aktif pembukaan organik USD 2,69 Juta Produk impor utama Indonesia dari Mozambik pada tahun 2019 adalah kapas sebesar USD 8,82 Juta, kacang

tanah USD 4,74 Juta, tembakau belum di fabrikasi USD 4,5 Juta, biji makan dan konsentratnya USD 1,2 Juta, udang USD 0,67 Juta.

Pimpinan Komisi VI serta,
Bapak dan Ibu Anggota Dewan yang saya hormati.

Urgency dari pengesahan IM-PTA dapat kami sampaikan sebagai berikut, diversifikasi negara tujuan ekspor, saat ini pangsa ekspor RI di kawasan Afrika hanya 2,1%, dibanding total perdagangan Indonesia ke dunia. Sementara, dengan kawasan lain seperti : Asia Timur sebesar 41,5%, Amerika Utara 9,8% dan Uni Eropa 8,8%. Oleh sebab itu, IM-PTA diharapkan dapat membantu mendorong pangsa pasar lebih besar ke Benua Afrika di masa depan.

Peningkatan daya saing produk Indonesia di pasar Mozambik, rata-rata tarif biaya masuk Mozambik 2018 untuk produk pertanian sebesar 14% dan non pertanian sebesar 9,7%. Melalui IM-PTA, beberapa produk ekspor utama akan mendapat referensi tarif bea masuk lebih rendah bahkan 0% sehingga, hal ini akan meningkatkan daya saing Indonesia di Mozambik. Mozambik sedang mengembangkan infrastruktur dalam rangka mendukung perannya sebagai hak di kawasan Afrika bagian timur dan sekitaran, antara lain dengan dibangunnya *Nakala International Airport, Nakala Airport city, Nakala seaport*. Pengembangan *cruise* dan *Jamal integrity tourism zone* dan *urbanization plan*, kawasan katembe.

Sambil menunggu selesainya perundingan dagang dengan Tunisia, Afrika Utara, dan dimulainya perundingan perdagangan dengan beberapa kelompok ekonomi di kawasan Afrika seperti *ECOWAS*, Afrika bagian barat, *SAQIU*, Afrika bagian Selatan, *ICU*, Afrika bagian timur dan Mozambik. Maka Mozambik dapat menjadi pintu masuk Indonesia di Benua Afrika. Penguatan industri dalam negeri akan mempunyai lebih banyak pilihan sumber bahan baku dalam negeri misalnya, kapas untuk industri TPT, kacang-kacangan untuk industri makan- makanan, minuman dan bahan tambang dengan harga dan kualitas yang cukup kompetitif sehingga, akan mendorong produktivitas industri nasional. Saat ini, bentuk perjanjian dagang dengan Mozambik adalah *preferential trade agreement*, yang hanya mengatur perjanjian barang dalam jumlah terbatas hal ini juga dilakukan sebagai bagian strategi, inkremental atau *step by step* di mana dengan IM-PTA, kedua usaha dapat menumbuhkan saling percaya dan kepastian berusaha.

Jika perjanjian ini mampu meningkatkan ekspor Indonesia secara signifikan, dan meningkatkan perdagangan negara di masa depan, bisa saja di kemudian hari perundingan dilanjutkan ke tahap berikutnya seperti *trade in goods agreement* atau *TIGA*, bahkan *Comprehensive Economic Partnership agreement* atau *CEPA*. Sebagaimana diperhatikan di layar, Mozambik memberikan preferensi tarif sebagai, sebanyak 217 pos tarif kepada Indonesia. Produk-produk unggulan Indonesia akan mendapatkan preferensi seperti minyak sawit, karet, kertas, furniture, produk perikanan dan makanan-minuman olahan. Di masa yang akan datang, IM-PTA ini dapat diperluas jumlahnya, cakupan barang sesuai dengan kesepakatan kedua negara. Di sisi lain, Indonesia akan memberikan komitmen sebanyak 242 pos tarif kepada Mozambik, antara lain, kapas, kacang-kacangan, biji bunga matahari, biji aluminium, kopi, produk perikanan, sayur dan buah-buahan. Produk-

produk tersebut dapat digunakan sebagai bahan baku untuk diolah menjadi produk bernilai tambah di Indonesia, termasuk untuk ekspor.

Pimpinan Komisi VI dan serta,
Bapak dan Ibu yang saya hormati.

Kami juga telah melakukan analisa SWOT, untuk menganalisa dampak persetujuan IM-PTA ini sebagai perekonomian Indonesia. Hasil Analisa SWOT ini menempati kuadran 1, dan ini merupakan posisi yang terbaik. Karena, posisi Indonesia berada pada daerah yang kuat dan berpeluang. Pada kuadran ini, Indonesia memungkinkan untuk melakukan pertumbuhan yang agresif karena, memiliki peluang dan kekuatan yang dibutuhkan. Berdasarkan analisa *cost benefit* dan pronoksa IM-PTA, terlihat bahwa ekspor Indonesia kemudian diproyeksikan meningkat 5 tahun ke depan. Hingga kelima meningkat menjadi USD 257 Juta, *surplus* USD 177 Juta.

Berdasarkan analisa prognosa, beberapa produk ekspor utama Indonesia ke Mozambik yang diproyeksikan akan mengalami peningkatan antara lain adalah produk minyak kelapa sawit dan turunannya akan mencapai USD 135,9 Juta pada tahun kelima, meningkat dari tahun 2019 yang sebesar USD 71,42 Juta. Selain itu, asam lemak untuk industri diperkirakan akan mencapai nilai ekspor 38,57 Juta, meningkat dari tahun 2019 yang sebesar 10,84 Juta, sabun dan turunannya sebesar 36,29 Juta, meningkat dari tahun 2019 yang sebesar 10,78 juta, serta *surface active preparations* sebesar USD 24,85 Juta, meningkat dari tahun 2019 yang sebesar USD 2,62 Juta.

Di sisi lain, beberapa produk impor Indonesia dari Mozambik yang diproduksi akan mengalami peningkatan, diantaranya adalah produk kapas, kacang tanah, dan bijih mangan. Produk kapas diproyeksikan akan mengalami kenaikan impor sebesar 21,23 Juta dalam 5 tahun kedepan meningkat dari tahun 2019 yang sebesar USD 8,84 Juta. Sementara, untuk produk kacang tanah, diprediksi akan mengalami kenaikan impor sebesar USD 11,46 Juta, meningkat dari tahun 2019 yang sebesar USD 4,77 Juta. Produk biji mangan akan mengalami kenaikan sebesar USD 2,68 Juta, meningkat dari tahun 2019 yang sebesar USD 1,12 Juta . Perlu mendapatkan perhatian, bahwa, impor Mozambik untuk produk minyak sawit dan turunnya dari dunia pada tahun 2019 sebesar USD 155 Juta, Mozambik impor dari Indonesia sebesar 71,42 Juta dan dari Malaysia USD 61,11 Juta.

Saat ini, rata-rata tarif bea masuk di Mozambik sebesar 12,4% dengan Malaysia sebagai pesaing utama. Selama 5 tahun terakhir, rata-rata nilai ekspor Indonesia masih dibawah Malaysia. Jika Indonesia dapat **(suara tidak jelas)** 0%, **(suara tidak jelas)** maka sangat berpeluang meningkatkan ekspor atau mendominasi pasar produk minyak sawit dan turunannya di Mozambique. Berdasarkan analisa SWOT, bahwa Indonesia perlu melakukan strategi agresif dengan memanfaatkan kekuatan domestik antara lain, dengan terus meningkatkan daya saing, standar kualitas, kapasitas produksi, dukungan pembiayaan bagi pelaku usaha, serta memanfaatkan popularitas produk Indonesia di kawasan Afrika.

Pasca Covid-19 ini, tujuan ekspor baru bagi Indonesia sangat diperlukan untuk pemulihan ekonomi nasional. Oleh karena itu, Kemendag atas arahan Bapak Presiden RI, melakukan berbagai cara dan upaya termasuk agar

implementasi IM-PTA dapat dipercepat sehingga, manfaatnya dapat diterima oleh para, para pelaku usaha. Secara paralel, promosi terus-menerus dan tertarget tetap dilakukan, baik dalam bentuk *online* maupun *offline*, termasuk misi dagang *trade expo* bisnis forum dan bisnis *matching*. Disamping itu, guna meningkatkan ekspor sekaligus menjaga neraca pembayaran, Kemendag saat ini tengah menjajaki diperluasnya skema imbal dagang, dan kawasan Afrika merupakan salah satu target utama.

Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR RI yang saya hormati,

Terkait mitigasi IM-PTA, dapat kami sampaikan bahwa, perjanjian IM-PTA ini tersebut sesuai dengan ketentuan WTO, di mana kedua negara adalah anggota. Oleh karena itu, perjanjian ini menerapkan prinsip ketentuan dan aturan WTO. IM-PTA juga mengatur mekanisme review yaitu, 2 tahun setelah diimplementasikan atau sesuai kesepakatan kedua pihak, artinya, IM-PTA memiliki mekanisme untuk memastikan jika di masa depan salah satu pihak merasa dirugikan dalam implementasinya. Terkait keawatiran lonjakan impor akibat IM-PTA, Indonesia maupun Mozambik dapat menggunakan mekanisme *safeguard* yaitu, tindakan pengamanan perdagangan sebagaimana telah diatur dalam IM-PTA.

Secara internal mitigasi lainnya, Indonesia dapat dilakukan adalah terus menerus mempromosikan penggunaan produk lokal. Gerakan bangga buatan Indonesia merupakan program strategis Kementerian Dagang, yang juga terus digencarkan yang bertujuan menumbuhkan kesadaran dan semangat masyarakat agar lebih mencintai produk Indonesia secara konkrit, melalui pembelian produk-produk dalam negeri. Terus melakukan reformasi ekonomi dalam mendukung produktivitas industri, menarik investasi dan juga meningkatkan daya saing, telah diundangkannya, Undang-Undang Cipta Kerja mendukung reformasi ekonomi Indonesia dan menjadikan Indonesia lebih menarik bagi iklim investasi dan lebih berdaya saing.

Pimpinan Komisi VI DPR RI serta,
Bapak dan Ibu Anggota Dewan yang kami hormati.

Persetujuan ini akan meningkatkan ekspor Indonesia ke Mozambik dan kawasan sekitarnya. Sementara, potensi kenaikan impornya tidak terlalu besar, dimana sebagian besar merupakan bahan baku yang dapat digunakan untuk proses produksi bernilai tambah di Indonesia. Persetujuan ini pada dasarnya tidak menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan atau haruskan perubahan atau pembentukan undang-undang. Pasca pandemic Covid-19, Indonesia perlu lebih agresif mendorong ekspansi ekspor ke pasar non tradisional atau potensinya, khususnya ke Wilayah Afrika. Mitra dagang alternatif diperlukan untuk meningkatkan dan menjaga kestabilan ekspor Indonesia, serta menjaga neraca perdagangan.

Persetujuan ini berbentuk PTA yang hanya mengkomitmenkan sejumlah barang saja. Hal ini berbeda dengan *free trade agreement* ataupun *Comprehensive Economic Partnership Agreement*, CEPA. Jumlah barang yang Indonesia komitmen kan dalam perjanjian IM-PTA ini hanya 242 pos tarif atau 2,23% dari total pos tarif Indonesia. Sementara, Mozambik

mengkomitmenkan 217 pos tarif, 3,9% dari total pos tarif Mozambik. Walaupun Indonesia mengkomitmenkan jumlah pos tarif yang lebih banyak, namun berdasarkan analisa *cost benefit* dan prognosa IM-PTA, secara nilai Indonesia diprediksi dalam 5 tahun kedepan mendapatkan keuntungan atau *surplus* yaitu USD 177 Juta.

IM-PTA merupakan bagian dari strategi perdagangan internasional Indonesia ke wilayah Afrika, dan kami berharap adanya perjanjian dagang dengan Mozambik dapat mendorong perjalanan dagang dengan negara-negara lainnya di Afrika. Sekaligus, menurut pro minat pelaku usaha Indonesia untuk berdagang dan berinvestasi dengan Amerika. Sebagaimana dipahami, Afrika merupakan kawasan yang tumbuh cepat dengan menawarkan potensi luas bagi Indonesia. Dapat kami informasikan, bahwa tanggal 24 November 2020 pemerintah Mozambik telah menyelesaikan proses ratifikasi IM-PTA, ini merupakan kabar positif, karena dengan demikian, jika Indonesia meratifikasi tinggal selangkah lagi kita dapat implementasikan perjanjian dagang pertama Republik Indonesia dengan negara di Benua Afrika. Berdasarkan pertimbangan diatas dan mengingat ketentuan Undang-Undang perdagangan serta, mempertimbangkan Undang-Undang perjanjian internasional, maka persetujuan ini perlu segera disahkan.

Demikianlah hal-hal yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan pertimbangannya Komisi VI DPR RI. Kami berharap dukungan penuh dari pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR RI yang terhormat untuk dapat menyelesaikan proses pengesahan persetujuan ini.

Sekian.
Terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Waalaikumsalam.

Pas 3 menit.
Baik.

Kita buka sesi pendalaman, ini yang mau nanya kayanya cuma Bu Evita aja nih. Ada. Nggak? Nggak ada.

Silahkan Bu.

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc):

Karena ini menarik nih, Bapak Pimpinan.

Pak menteri dan jajaran yang saya.

ANGGOTA:

Nanti daftar.

ANGGOTA:

Daftar Bos.

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc):

Terima kasih Pak Menteri atas paparan yang diberikan. Saya rasa sangat komprehensif ya Dan apa namanya hal-hal yang sebenarnya ingin kita pertanyakan ada beberapa poin. Ini saya baca sudah, sudah termasuk di dalam paparan Pak Menteri.

Sebenarnya kalau kita lihat sekarang, ya kalau kita nggak sahan, kita rugi kalau pandangan saya. Karena kan sebenarnya ini merupakan amandemen daripada Undang-Undang induknya tadi, Undang-Undang utama yang Pak Menteri katakan tadi AJCEP, ya kan. Dan di sini saya lihat, kenapa dilakukan amandemen *first protocol* ini, ya karena yang lama kita hanya mencakup perjanjian dagang barang *trade* di barang, ya Pak ya. Sekarang ditambah bab-bab baru, yang memang menambahkan perjanjian kerjasama *partnership* kita di bidang jasa, investasi dan apa Namanya, *movement of natural person* itu kan maksudnya, tenaga kerja ya kan, dan *chemist skill dan skill*. Jadi, kalau saya baca semuanya sih Pak, sebenarnya ya kita harus cepat, harus segera untuk meratifikasi ini. Kalau nggak kita ketinggalan dengan negara-negara ASEAN lain yang sudah memang meratifikasi ini terlebih dahulu.

Kemudian yang dari negara-negara ASEAN hanya tinggal beberapa negara, ya Pak ya. Kenapa saya katakan kita harus segera meratifikasi, yang seperti Bapak katakan tadi. Bahwa, Undang-Undang ini tanpa kita pun sudah berlaku kan begitu, Pak. Yang sudah *entry into force* gitu, ya karena aturan Undang-Undang ini ya seperti itu. Satu negara saja yang sudah memberikan notifikasi kepada Sekretariat ASEAN, undang-undang ini sudah berlaku, kan begitu Pak. Nah, tinggal kalau kita tidak ratifikasi, ya kita ketinggalan, apa, kehilangan *opportunity* dan manfaat yang kita bisa, apa namanya, kita galih daripada refisi, amandemen daripada undang-undang tersebut.

Tentunya, kita juga berharap nih, Pak Menteri, bahwa maupun Undang-Undang utamanya AJCEP, ya kan, ASEAN-Japan, *Comprehensive Economic Partnership* ini, walaupun, dan juga *first protocol to amend* ini, ini akan menjadi salah satu solusi dari kita untuk mengurangi defisit perdagangan kita, Pak. Kita tentunya berharap dengan ini kita sahan ya defisit perdagangan non migas kita ya kan itu bisa, bisa berkurang. Jadi ya memang saya berharap, Pak Menteri karena ada udah ada bab-bab baru, pasal, bab-bab baru di dalam amandemen ini, ya Bapak mengejar itu yang namanya perjanjian yang *non trade* itu, Pak, ya kan, perjanjian yang berkaitan dengan investasi dan MNP.

Kita tahu ya kan, kemarin ini waktu pertemuan *World Bank* dan IMF itu juga dibicarakan bahwa, Jepang itu memang kekurangan tenaga kerja muda ya kan, itu krisis boleh dibilang, Jepang, Korea, Cina, ya kan. Sementara, kita ini yang mempunyai tenaga kerja aktif itu yang luar biasa besarnya, tapi memang sayang, Pak Menteri, kita ini selalu kalah bersaing dengan negara-negara lain. Nah, ini yang saya harapkan Pak Menteri bisa memikirkan ke depan ini, peluang ada, ya kan, tapi bagaimana kita, apa namanya

meningkatkan SDM kita. Tidak salah kalau Pak Jokowi sebenarnya berkonsentrasi tahun ini dan ke depan ini kita benar-benar berkonsentrasi untuk meningkatkan SDM kita.

Tadi Pak Menteri menginginkan beberapa *opportunity*, saya dengar di bidang ini, bidang ini. Bapak lupa menyebutkan, bapak hanya bilang beberapa turunannya. Bapak lupa menyebutkan bahwa, Jepang itu selama ini mengimpor istilahnya tuh semi-skilled dan *skilled labour* kita di perawat, Pak. Perawat kita itu banyak dikirim ke Jepang, tapi ketika saya masih di Komisi 1, saya kunker-kunker, saya menanyakan masalah yang kita hadapi itu adalah *barrier of communication*. Jadi, Inggris bahasa apa komunikasi itu kita merupakan *barrier* kita, Pak. Nah, ini yang Menteri Perdagangan ini dan jajaran harus memikirkan, peluang untuk investasi, peluang untuk *movement* daripada tenaga kerja kita itu ada. Nah tapi, kalau kita nggak mampu untuk mengirim, apa namanya, tenaga kerja tersebut ya kita rugi juga, Pak. Sementara dia bisa kirim, kita nggak bisa kirim, kan begitu Pak. Ini yang ini yang harus saya harapkan Pak Menteri apa namanya, berkonsentrasi ke sana juga, Pak.

Kemudian, saya juga berharap, Pak Menteri, itu melakukan koordinasi, Pak, koordinasi yang intens, ya kan, yang, yang apa yang lebih erat lagi dengan yang terkait, Pak, *stakeholder* terkait ada BKPM, ada Kemlu kan di dalam sini, ada Menaker. Nah ini, semuanya mempunyai keterkaitan yang sangat, yang sangat luas nggak bisa pak menteri bekerja sendiri, ya kan. Karena kenapa saya katakana, Pak, membuka *market* non-tradisional *market* ini sudah lama, Indonesia-Africa ini masih saya duduk di Komisi I, Pak. Kemlu itu sudah konsentrasi di Afrika, yang Bapak sebutkan tadi. Tapi kan, implementasi kita ni lambat, kan begitu Pak. Oleh karena itu, itu hal-hal yang ingin saya sampaikan mengenai isian ASEAN-Japan *Comprehensive Economic Partnership*, Pak. Dan saya ke Mozambik, ke Mozambik Bapak mengatakan tadi bahwa, ini adalah perjanjian pertama kita dengan negara-negara Afrika. Nah, tentunya kita harus dorong, Pak. Ini adalah non tradisional *market* kita, ini yang diinginkan oleh Bapak Presiden di dalam pembukaan pidato yang, apa-apa, *trade*, yang tadi Bapak sebutkan, *trade expo*.

Jadi, kita berharap bahwa, perjanjian yang pertama ini dengan Mozambik itu akan sebagai *basis* kita, Pak, *basis* kita membuka pasar kita di negara-negara, apa namanya, Afrika terutama tentunya di negara-negara SADC, Pak, *Southern African Development Community* yang mereka itu ada 16 negara di dalamnya, dan total penduduknya 350.000.000. Luar biasa sebenarnya *market* Afrika ini, ketika bisa kita *grab*. Kita pergi Komisi I waktu itu ke Pantai Gading. WIKA datang pada saat itu, tapi enggak tahu saya *follow up* nya seperti apa, sudah mau masuk, WIKA mau menggalang properti di sana, mereka mengatakan, Pak. Saya ketemu dengan Menlu, parlemennya, mereka sudah capek dengan Cina, *the only country* yang di sana tuh cuman Cina. Mereka udah capek, mereka *looking into other country*, untuk sebagai investasi, menanam investasi di tempat mereka.

Nah ini, yang harus kita, harus kita *grab* untuk hal tersebut dan tentunya, sekarang ini kita tahu, tanpa kita menandatangani perjanjian dengan Afrika ini kan impor *tax* mereka tinggi, yang diberlakukan ke kita sekarang ini. Kan rugi kita, kita berharap dengan ini, ya kita jadi daya saing kita juga ada jadi, impor *tax*nya juga bisa dikurangi, dan saya mendorong agar Pak Menteri segera

membuka yang Bapak sebutkan tadi, peluang-peluang ada Tunisia, ada Maroko, ada Mauritius, kan begitu Pak. Apalagi Mauritius, saya dengar kemlu sekarang lagi ke sana, konsentrasi ke Mauritius. Kenapa mereka konsentrasi di Mauritius, karena itu kayak Singapur, Pak, *central of trading* di Afrika itu. Nah ini, saya rasa, saya minta Pak Menteri bisa melakukan koordinasi dengan *stakeholder* terkait, Kementerian lain yang terkait. Saya rasa demikian, Bapak Pimpinan. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik.
Terima Kasih Bu Evita. Luar biasa.
Pak Tommy. Silahkan Pak Tommy.

F-PKB (TOMMY KURNIAWAN):

Terima kasih, Pimpinan.
Rasanya apa yang mau saya sampaikan sudah diborong semua sama di sapu bersih sama Bu Evita.

Pak Menteri beserta jajarannya hormati,
Pimpinan yang saya hormati.

Jadi sekedar mengingatkan aja, karena tadi sudah banyak juga yang di sampaikan oleh Bu, Bu Evita terkait dengan perjanjian-perjanjian yang telah dan akan disetujui oleh kita. yang pertama terkait dengan, apa namanya, Jepang dengan ASEAN salah satunya dan kita, terkait dengan tenaga kerja. Sebenarnya, kita juga perlu mendapatkan sebuah laporan. Sebenarnya, tenaga, tenaga atau sumber daya manusia itu, kita itu sudah siap, apa, untuk apa namanya, menembus pasar Jepang. Kita tahu bahwa, seperti tadi yang sudah disampaikan, bahwa tenaga medis ini kan sudah banyak.

Saya juga pernah pergi ke salah satu itu, apa namanya, salah satu tempat pendidikan tenaga medis yang kerjasama dengan Jepang. Nah, 1 tahun mereka bisa mengirim sekitar 5 sampai 10. Nah ini, kan kita juga perlu juga sebenarnya datanya. Apalagi, tadi juga ada, apa namanya, ada travel, dan lain sebagainya. Nah, itu SDM kita sesiap apa untuk bisa mengambil *opportunity* ini. Ini sih, Saya mengingatkan bahwa, pembangunan sumber daya manusia ini penting banget, karena kita tahu sendiri bahwa, Jepang itu sekarang mengalami yang namanya, usia yang tidak produktif itu jauh lebih banyak daripada yang produktifnya itu.

Kemudian mengenai Mozambik, Saya kira peluang besar yang, apa namanya, yang didapat apalagi kita *surplus* sampai USD 110 Juta, itu harus dipertahankan. Yang kedua, produk *competitiveness* nya itu gimana. Apakah, apakah yang di libatkan nanti hanya itu-itu saja, atautkah ada perluasan *market*. Kita tahu bahwa, saat pandemi ini UMKM kita yang membuat Indonesia bertahan saat ini. Apakah akan melibatkan mereka. Koordinasi lintas sektoral juga saya kira perlu di perkuat, agar UMKM-UMKM kita ini juga bisa merasakan yang namanya pasar global. Saya kira saya mengingatkan bahwa, penguatan produk dalam negeri itu menjadi satu hal yang harus di bawahi.

Saya kira itu, Pimpinan.
Terima Kasih.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Baik.

Karena yang hadir disini cuma berdua, sekarang kita bisa beralih ke *virtual*. Yang pertama Bapak Ananta. Hadir.

F-PDIP (ST. ANANTA WAHANA, S.H.):

Ya. Terima kasih. Sebentar. Sebentar. Saya cari tempat dulu. Saya di Rumah sakit soalnya.

Terima kasih.

Pimpinan dan Anggota Komisi VI.
Pak Menteri,

Saya hanya ingin menyampaikan saja. Pertama, soal kemitraan dengan negara sahabat. Ini merupakan sebuah ke niscayaan di abad yang, di abad ke 21 ini. Dengan Mozambik, ini dipastikan *surplus* sehingga, ini menjadi kepentingan nasional kita dan ini mesti, harus segera di realisasi. Kalau dengan ASEAN dan Jepang, ini merupakan negara-negara sahabat kita, yang sudah lama dan ini mitra strategis. Jadi, ini juga mesti harus untuk kepentingan kawasan, ini perlu kita lakukan. Tapi, persoalannya bukan persoalan kemitraan, tapi persoalan pengelolaan perdagangan dalam negeri. Ini yang pertama.

Kemudian yang kedua, kalo tidak saya sampaikan, ini menjadi persoalan dan beban saya. Pada saat kemarin kami kunjungan di Kalimantan Barat, Pak. Kami kedatangan teman-teman dari Entikong. Itu dari apa, asosiasi perdagangan perbatasan. Mereka mengatakan bahwa, Presiden sudah membangun *border*, kira-kira 1 triliun tetapi, *border* itu hanya dipakai untuk *selfie* orang Malaysia. Sekarang terbalik, kalau orang Malaysia datang ke Entikong itu *selfie*, di situ *border* itu tidak ada kegiatan perdagangan. Sehingga, teman-teman itu mengharapkan kalau Presiden datang ke situ, Menterinya diminta untuk hadir di tempat itu, karena *border* itu sekarang ini mangkrak dan tidak dipakai untuk melakukan perdagangan. Sedangkan, harapan Presiden itu dilakukan menjadi perdagangan perbatasan dan disitu terjadi kesenjangan sosial yang luar biasa. Jadi, kalau kita bicara tentang perdagangan apa, kerjasama antar negara di situ juga pintu yang sangat dekat dengan, apa namanya, ASEAN tentunya dengan Malaysia dan sebagainya. Barangkali ini yang mesti harus diperhatikan juga.

Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan.
Terima kasih, Pak Haekal.

KETUA RAPAT:

Baik. Terima kasih, Pak. Mudah-mudahan gak sakit di rumah sakit. Bapak Mukhtarudin. Hadir. Bapak Mukhtarudin. Kalau belum, kita dahulukan yang lain ya. Bapak Deddy Sitorus, Bapak Deddy.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Ya, Pimpinan. Jelas.

KETUA RAPAT:

Jelas, Jelas.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Baik. Terima kasih, Pimpinan.

Bapak Menteri Perdagangan saya hormati dan jajaran Kementerian Perdagangan.

Tadi saya mendengar, melihat, menyimak presentasi yang disampaikan dan ada beberapa hal mendasar yang sebenarnya ingin saya minta, apa namanya, penjelasan lebih jauh.

Yang pertama, tentu menyangkut, apa namanya, pemetaan ya, tadi menggunakan analisis SWOT. Nah, kalo menurut hemat saya, selain SWOT sudah banyak udah metode, apa namanya, analisis lain, perencanaan lain yang lebih *comprehensive* daripada sekedar SWOT. Kenapa? Karena SWOT itu kadangkala terjebak dalam pemikiran *linier*, Pak. Kalau a, maka b, maka c, maka d. Padahal, dunia ini kan tidak selalu sifatnya *linier*, tapi bisa organik, bisa *cycle* sifatnya. Nah, itu yang pertama. Jadi, saya minta pendalaman lebih jauh lah, daripada analisis itu. Nah, ini kan terkait dengan turunan, strategi yang Bapak tampilkan tadi. Karena, saya melihat kan strategi kan tidak semua ada, apa namanya, eksekusi pelaksanaan programnya. Jadi, strategi kan taktik dan program, ya. Tidak semua dari Kementerian Perdagangan.

Nah, ini yang kemudian akan menjadi persoalan bagi kita. Bagaimana supaya ada kondaktur yang benar-benar mengawasi. Apakah itu Menko maritimves, apa itu Menko Ekuin, apakah Menko, Menteri apalagi sumber daya manusia dan sebagainya, Pak. Karena, tanpa kejelasan ini, tanpa kejelasan bagaimana, apa namanya, ini dirancang secara bersama-sama, akhirnya jadi *divergent*, Pak. Kementerian Perdagangan sudah menyiapkan ini tetapi, tidak apa namanya, *inline* dengan Kementerian Perindustrian, Kementerian Pendidikan, dengan BKPM, dengan Kementerian Luar Negeri, dan seterusnya, dan seterusnya, Pak, apalagi kepala daerah misalnya, dengan Kementerian Pendidikan, kan ini semua ada kaitannya.

Saya berharap, Pak, perjanjian ini tidak hanya manis dikertas, lalu semuanya berjalan secara alamiah saja, Pak. Tidak *inline* antara semua instansi, juga tidak ada resonansinya dalam, apa namanya, RPJMN maupun APBN kita. Nah, ini yang menurut saya, kita harus *design* dengan benar,

supaya memberi manfaat sebesar-besarnya, Pak. Saya takut, nanti ini hanya diatas kertas aja, gitu loh. Sementara negara seperti Jepang, itu infrastrukturnya, sektor *private*-nya, sektor negaranya itu berjalan baik. Kita kan belum, Pak.

Nah ini, bagaimana nanti, ini Bapak, ya bisa bersama Menko Maritimves atau Menko Maritime lain bersama-sama duduk satu meja, Pak sehingga, perencanaan di Kementerian Perindustrian, perencanaan di BPKM, di pendidikan dan seteursnya, dan seterusnya, itu memang sejalan. Kalau tidak, ya ini ada dokumen yang bagus, ada peluang yang bagus, tapi tidak, tidak, apa namanya, bisa di dilaksanakan dengan baik. Kenapa.? Karena faktor asumsi dan resiko tidak sama sama dihitung, tidak dengan semua kementerian dan lembaga yang lain.

Nah, ini saya minta, Pak. Saya minta, betul didetailkan sampai ke APBN, Pak, kalau memang kemudian ada bagian-bagiannya, misalnya, menyiapkan sumber daya manusia, memfasilitasi sektor-sektor yang kemudian bisa mengambil manfaat, gitu. Nah, itu saja kira-kira, Pimpinan. Saya berharap bahwa perjanjian ini tidak sekedar perjanjian yang dilepas begitu saja, lalu masyarakat dan sektor private kita itu berjalan secara alamiah tanpa ada intervensi atau pendampingan dari negara baik melalui fasilitas kebijakan maupun yang lainnya.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik.

Terima kasih.

Kita kembali ke Pak Mukhtar, masih ada. Oke nampaknya nggak hadir. Mungkin dari ini, daftar penanya udah abis. Apakah ada dari meja Pimpinan.

F-PDIP (ARIA BIMA):

Ya. Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya. Pak Bimo, silakan.

F-PDIP (ARIA BIMA):

Pimpinan, ini memang saya mencermati betul dari apa yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri. Jadi, ratifikasi ini yang sekarang diajukan itu adalah satu, satu proses yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari, dari, dari proses sebelumnya, dari proses sebelumnya. Seperti yang dipaparkan Pak Menteri bahwa ini adalah satu, satu bagian yang pernah dibicarakan sewaktu kita belum mempunyai Undang-Undang Perdagangan, Undang-Undang Perdagangan sehingga, waktu itu opsi hanya satu jalan, yaitu Perpres.

Nah, yang saya kritisi di sini, kita memang tidak bisa, tidak bisa lagi untuk mengambil jalan undang-undang karena perjanjian sebelumnya adalah

bangunan hukum sudah Perpres. Namun, argumentasi bahwa persoalan perjanjian AJCEP ini adalah sesuatu yang tidak berdampak luas, ini, ini harus menjadi satu catatan kita di Komisi VI. Jadi, Pak Menteri. Saya melihat, AJCEP ini adalah satu perjanjian yang sangat berdampak luas, tapi kali ini kalau dibawa ke Komisi VI, tentunya kita sadar perjanjian ini tidak mungkin kita bawa ke langkah undang-undang karena, terus terang saja apalagi kalau masuk di dalam bidang jasa, kita sangat tidak bisa atau masih sangat kalah bersaing dengan Jepang. Maka kalau di dalam catatan bahwa Pak Menteri menyebutkan manfaat protokol ini, Pemerintah akan meningkatkan daya saing penyediaan jasa Indonesia di berbagai subsektor jasa yang merupakan kekuatan di Indonesia antara lain adalah sektor transportasi, kemudian asuransi, pariwisata dan konsumsi, kemudian mendorong investasi asing, sub sektor jasa tetap harus bekerjasama dengan penyediaan jasa lokal agar terjadi alih pengetahuan dan alih teknologi, para penyedia jasa dalam negeri, tentunya perlu ada sesuatu langkah-langkah konkritnya bagaimana.

Siapa yang bertanggung jawab soal ini? Itu yang saya kira Pak Menteri perlu jelaskan kepada kita dan, dan tentunya semua itu tidak lepas dari, kita melihat pada proses perjanjian-perjanjian internasional sebelumnya, yang kita lihat perjanjian-perjanjian perdagangan internasional yang sudah kita tandatangani, kita sepakati itu seperti apa. Aktivitas kegiatan perdagangannya, ya. Ini yang, yang, yang kita ingin mendapatkan masukan lebih dalam. Peningkatan aktivitas kegiatan perdagangan yang saat ini kalau kita lihat dari pusat data statistic, ya, sebelum pandemi saja, kita ini masih dalam posisi mengalami *trend* peningkatan tetapi, kenaikan tetap perdagangan itu tidak, kemudian ditandai dengan *surplus* neraca perdagangan, yang, *surplus* nerca perdagangan. Tetapi, justru beberapa sektor perjanjian kita itu, justru berdampak pada minusnya perdagangan kita. kalau toh minus, itu pun juga posisi kita masih tergantung dengan produk-produk sektor Migas. Ini yang saya kira perlu ada satu pencermatan.

Kalau soal persetujuannya, kita tidak bisa, tidak bisa bernavigasi agak, agak, agak argumentatif kecuali, tetap menyerahkan ini pada proses melanjutkan perjanjian sebelumnya dalam bentuk Perpres kecuali, yang satunya, Mozambik ya. Tetapi, kalau itu pun Mozambik juga hanya beberapa komoditas, tidak mungkin kita jadikan undang-undang. Namun sekali lagi, kita tetap menginginkan dari pihak kementerian sendiri, bagaimana korelasi yang positif antara total perdagangan kita dengan Jepang, dengan neraca perdagangan kita. Ini penting untuk terus dicermati. Jangan sampai *surplus* neraca perdagangan yang sering kita lihat dominasi, dominasinya masih di sektor non migas.

Ini yang, yang kita berharap Kementerian Perdagangan periode ini tetap mencermati bagaimana total perdagangan Indonesia, yang menurut data statistic baru mencapai sekitar USD 22,8 Miliar, ya. Dan untuk di 2020 ini, kita juga mengalami penurunan sebesar hampir 3,2% dibanding periode 2019. Ini penting sekali supaya, kebijakan *regulator* dan kegiatan mikro ini juga harus jadi bahasan-bahasan *internal* di Menteri Perdagangan. Memang penurunan ini banyak disebabkan karena covid-19 yang melanda Indonesia dan dunia sehingga, aktivitas *real* di Indonesia dan negara-negara mitra dagang kita itu mengalami perubahan juga.

Mengenai 5 tahun terakhir. Saya kira perlu kita cermati, neraca perdagangan Indonesia, dan kita berharap dari total perdagangan Indonesia

yang kita hitung 5 tahun terakhir. Kalau kita hitung dari 2018 pernah mencapai nilai tertinggi dibanding tahun-tahun yang lain. Tapi sekali lagi, akan tetapi neraca perdagangan Indonesia pada tahun yang sama atau tahun 2018 itu harus menjadi satu, satu perbandingan neraca perdagangan, neraca perdagangan ditahun tahun sebelumnya.

Ini yang perlu kami sampaikan. Kita berharap perjanjian-perjanjian ini kemudian kita tidak latah, ya karena kita belum menandatangani sendiri dan ditandatangani atau tidak, perjanjian tetap berlaku. Jepang saya kira mitra strategis kita. Kementerian Perdagangan walaupun perjanjiannya ini adalah ASEAN, bisa melakukan langkah-langkah terobosan sebagai satu negara sebagai mitra strategis kita, yang mana tingkat ketergantungan terhadap komoditas primer, itu tidak cukup tinggi. Misalnya begini, Pak Menteri, untuk energi listrik, baik gas maupun batubara 30% energi listrik Jepang itu adalah tergantung di sektor batu bara dan gas kita. Jadi, kalau hari ini kita menghentikan batu bara dan gas kita, sekitar 30% listrik Jepang tuh mati. Nah, kekuatan-kekuatan seperti ini harusnya menjadi kekuatan diplomasi perdagangan kita, untuk meningkatkan komoditas-komoditas non-energi. Ini yang penting, jangan sampai kemudian kita tidak ngerti persis posisi-posisi politik-ekonomi kita sehingga kemudian dari segi pasar kita, separuh dari umat di ASEAN dan kemampuan ekspor kita yang menyangkut strategi kepentingan ekonomi Jepang juga demikian tinggi.

Nah, *branding* atau kesadaran semacam ini tentu, harus dikapitalisasi sebagai satu langkah-langkah untuk membangun mitra strategis, untuk produk-produk non komoditas yang kita miliki dengan pihak Jepang. Ini yang menurut saya penting untuk disampaikan ke pihak Jepang dengan berbagai diplomasi- diplomasi yang terus dilakukan oleh Kementerian Perdagangan. Itu yang bisa kami sampaikan, Pimpinan rapat. Dan saya berharap, mengenai 2 (dua) materi hari ini menjadi satu, satu hal yang tidak bisa kita buat enteng begitu saja, ya. Kalau yang Mozambik saya kira itu pasar. Tapi, kita nggak perlu dicermati karena pasti ada negara-negara lain yang melihat Mozambik sebagai pasar.

Dengan Jepang strategis yang kita bangun, walaupun perjanjian dengan ASEAN tapi banyak hal yg dilakukan strategi *dialogue-dialogue* untuk Indonesia-Jepang, dan hubungan politisi ideologis, saya kira historis. Jepang mempunyai satu perbedaan dengan Indonesia, dibanding dengan negara-negara lainnya. Maka kita harapkan, dengan persetujuan DPR, ya. Ini bisa lebih memberikan ruang pada Kementerian Perdagangan, untuk lebih bisa menjadikan posisi peran, untuk melakukan dialog, untuk melakukan hubungan-hubungan dagang, ya. Tidak ada perdagangan yang bebas. Ini perang dagang, ya. Pikiran kita jangan sampai nanti perdagangan, Kementerian Perdagangan menjadi Kementerian impor tapi Kementerian untuk lebih pada konsentrasi ekspor. Kalau yang impor boleh dimainkan di, dengan pengaturan. Tapi, jujur yang ekspor itu perlu ada semacam pendorong aturan-aturan yang lainnya.

Begitu juga dengan pihak Jepang. Kita tidak bisa melihat perjanjian ini dengan Perpres karena menurut saya ini tetap berdampak luas. Karena, dalam dalam banyak hal, kita dengan Jepang itu kalah kompetitif kecuali, di produk komoditas. Tapi, karena ini merupakan perluasan dari perjanjian sebelumnya, dimana perjanjian sebelumnya itu, waktu itu kita belum mempunyai Undang-Undang Perdagangan, belum ada keterlibatan parlemen.

Maka, dalam kaitan ini, kalau toh kita menyetujui, bukan berarti argumentasi Kementerian Perdagangan ini bahwa, perjanjian ini tidak berdampak luas, itu bisa dibenarkan.

Kita hanya bisa mensikapi perjanjian ini dengan Perpres karena merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian yang sebelumnya. Karena, waktu itu kita belum menerima kewenangan untuk yang merupakan bagian dari keturunan Undang-Undang Perdagangan. Dalam hal perjanjian internasional, parlemen atau DPR mempunyai kewenangan untuk membahas, menentukan perjanjian itu, diputuskan lewat Perpres atau Undang-Undang.

Saya kira itu, Pimpinan.
Terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik.
Terima kasih, Pak Bimo.

F-PD (HJ. MELANI LEIMENA SUHARLI):

Daftar, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Oke. Bu Melani sama.

F-PKS (Hj. NEVI ZUARIANA):

Ibu Nevi, Pimpinan. Ibu Nevi.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Andre, Pimpinan. Jangan lupa. Tadi udah kasih tau Pimpinan dari tadi.

KETUA RAPAT:

Ya. Ya. Ya. Baik. Kok ini jadi pada nambah ya. Baik. Ibu Melani, Ibu Nevi. Oke. Ya, coba. Andre kita minta ngalah dulu lah, buat ibu-ibu senior kita ini.

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Kalau ngalah, saya jalan dulu.

F-PPP (H. ACH. BAIDOWI, S.Sos., M.Si):

Ya. Saya ngalah aja.

KETUA RAPAT:

Ada Pak Baidowi juga. Sebentar. Ini Ibu, Ibu Melani dulu, baru Bu Nevi, baru Pak Andre dan Bang Awi. Oke. Silahkan Bu.

F.PD (HJ. MELANI LEIMENA SUHARLI):

Terima kasih, Pimpinan.

Yang saya hormati Pimpinan dan teman-teman Anggota Komisi VI,
Yang saya hormati Pak Menteri Perdagangan dan jajarannya.

Saya hanya hendak menanyakan tentang pengesahan persetujuan perdagangan profession, profession antara Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Republik Mozambik. Yang saya mau menanyakan, sejauh ini bagaimana perjanjian ini akan lebih konkrit dan memberi manfaat dan kemudian kepada para eksportir utamanya dalam biaya logistic karena, kita tahu dari data *Logistic performance index* 2018, Indonesia itu kalah, baru peringkat 46. Kalah dengan negara lain seperti : Malaysia, Vietnam dan negara ASEAN lainnya.

Yang hendak saya tanyakan, ini juga dengan biayanya yang jauh, Mozambik itu bagaimana dengan ekspor produk UMKM, tentunya berpengaruh terhadap daya saing mereka. Dan bagaimana manfaat *real-nya* langsung untuk para eksportir yang juga dari UMKM. Kemudian satu lagi, perjanjian hubungan perdagangan antara Indonesia-Mozambik, juga banyak komoditas-komoditas yang belum tergarap, meskipun kebutuhan Mozambik itu sangat besar, misalnya antara lain, produk biscuit, margarin dan karung berbahan tekstil. Padahal ekspor biskuit itu sebanyak 14 ton baru. Tetapi, kebutuhannya sebenarnya di sana 38.000.000 ton, juga untuk karung berbahan tekstil yang baru diekspor 436 ton, sementara kebutuhan bahan impor nya 23.000 ton. Mungkin saya hendak sampaikan, bagaimana untuk pengesahan persetujuan perdagangan ini terhadap peningkatan ekspor komoditas-komoditas tersebut.

Mungkin itu saja, Pimpinan.
Terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam.

Bu Nevi, silahkan.

F-PKS (Hj. NEVI ZUARIANA):

Ya. Terima kasih.

Pimpinan, dan
Anggota Dewan Komisi VI yang kami hormati, dan

Menteri Perdagangan bersama jajaran.

Saya pertama mengenai Indonesia dengan Jepang. mengenai manfaat yang diterima Indonesia dari Jepang diantaranya adalah peningkatan nilai ekspor pada tahun 2019, mohon disampaikan data mengenai UMKM. Dari transaksi 2019 yang senilai USD 1,62 Miliar tersebut. Kita tentu berharap, hal ini juga dirasakan oleh masyarakat menengah kebawah, terutama pelaku UMKM. Bukan pengusaha-pengusaha besar saja. Dan tentu, kita juga ingin tahu bagaimana evaluasi kerja sama tersebut untuk 2019 dan untuk sampai tri semester 3 untuk tahun 2020 ini. Beberapa hasilnya. Mengingat pandemi covid dimulai pada awal tahun 2020. Tentu bagaimana dampak covid terhadap kerjasama ini. Itu yang pertama.

Lalu yang kedua, selanjutnya tentang *claim* asal produk yang bahan baku *regional minimal* melebihi 40%. Apakah keuntungan dari ketentuan ini, dan seperti apa dampak ekonomi bagi kita. Dan apakah kita siap, dan ada produk-produk kita yang bisa menempatkan ketentuan 40% ini.

Dan terus yang terakhir, kami dari Fraksi PKS meminta kepada Pemerintah dengan adanya ratifikasi perjanjian AJCEP, Pemerintah tetap harus melindungi industri jasa strategis seperti: keuangan, pendidikan dan kesehatan. Pemerintah juga perlu memastikan tenaga kerja dalam negeri dapat terserap dengan baik, mengingat Indonesia diprediksi akan mengalami bonus demografi.

Selain itu, kami mendukung dan mendesak agar pemerintah segera melakukan ratifikasi persetujuan Kementerian Ekonomi menyeluruh ASEAN tentang ini melalui penerbitan Peraturan Presiden. Itu yang dengan perjanjian, lalu yang dengan pemerintah Mozambik. Kami mengingatkan bahwa kita banyak impor pertanian, Pak. Komoditas pertanian. Tentu tolong disampaikan, bagaimana analisa berdasar fakta lapangan utamanya mengenai kemampuan petani dan lahan kita dan tentu kita harus memiliki ketahanan pangan dengan baik. Karena dari Mozambik kita banyak impor pertanian dan tentu kita harus memanfaatkan hasil pertanian dan hasil laut ini untuk meningkatkan ketahanan pertanian kita.

Terima kasih, Pimpinan.
Itu saja.

KETUA RAPAT:

Baik.
Terima kasih.
Pak Andre.

F.P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Siap, Pak Haikal.

Terima kasih.

Pimpinan, Bapak Haikal.
Pak Menteri dan seluruh Anggota Komisi VI DPR RI yang saya hormati.

Saya sudah mendengar keterangan Pak Menteri, Pemerintah dan juga seluruh Anggota DPR. Pasti kita punya komitmen yang jelas bahwa, semuanya tentu untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Saya hanya menyinggung soal teknis saja, Pak Menteri. Saya mengusulkan, tidak ada, tidak perlu kita melakukan perubahan undang-undang, kita dorong saja ratifikasi ini melalui Perpres sehingga tahun 2020 ini bisa kita realisasikan, tanpa perlu kita melakukan perubahan undang-undang yang akan berdampak luas terhadap masyarakat. Saya mengusulkan Pimpinan dan Pak Menteri, ratifikasi ini kita laksanakan melalui Peraturan Presiden saja sehingga 2020 ini bisa kita realisasikan.

Soal keberpihakan ekspor kita berpihakan terhadap UMKM, tentu pastinya itulah peran pemerintah untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Jadi usulan saya itu saja, Pimpinan dan Pak Menteri. Diratifikasi saja, direalisasikan saja melalui peraturan Presiden biar cepat dan bisa direalisasikan akhir tahun 2020.

Terima kasih, Pimpinan. Terima kasih Pak Menteri.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Waalaiikumsalam Warahamtullahi Wabarakatuh.

Oke, Pak Awi.

F-PPP (H. ACH. BAIDOWI, S.Sos., M.Si):

Ya.

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Pimpinan dan Anggota Komisi VI yang kami hormati,
Pak Menteri Perdagangan yang kami hormati,

Menyimak apa yang disampaikan tadi, bahwa ini memang sebuah keniscayaan dan sebuah keharusan, yang harus segera terealisasi terkait dengan perjanjian-perjanjian tersebut. Maka, kami tentu apa yang disampaikan oleh saudara saya tadi, sebelumnya Pak Andre. Saya setuju itu. Jadi, memang cukup melalui Perpres dan kalau bisa segera ditandatangani Perpres-nya dipastikan kepada Presiden kalau bisa hari ini ya, paling tidak besok hari libur, ya. Minggu-minggu inilah Perpres-nya sudah ditandatangani sehingga, segera ada kepastian. Tentu saja terkait dengan perjanjian itu, baik dengan Jepang maupun dengan yang Mozambik.

Yang kita harapkan sih, dapat meningkatkan aliran investasi, khususnya Jepang ke Indonesia. Yang juga meningkatkan alih proses, proses alih teknologi, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing nasional. Karena, memang tujuan kita bikin perjanjian dengan negara-negara sahabat, ya kita harapannya ada peningkatan supaya pertumbuhan ekonomi

kita juga bertambah. Dan saya kira untuk lain-lain, kami sepakat apa yang menjadi inisiatif ataupun ikhtiar dari pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita. Yang terpenting, dalam perjanjian-perjanjian ini, ya Indonesia dengan sampai rugi, dirugikan, tetapi bagaimana kita memanfaatkan perjanjian-perjanjian ini dengan cara apa, meningkatkan daya saingnya. Tentu tidak hanya sekedar perjanjian selesai, tapi *follow up*nya dalam rangka meningkatkan daya saing kita, itu juga harus dilaksanakan, Pak Menteri.

Saya kira itu, Pimpinan.
Terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Waalaiikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih, Pak Awi, yang sepertinya ada di ruangan ini.

Baik. Mungkin dari pimpinan lagi. Sudah cukup ya. Mungkin saya ada sedikit ini juga sih, pandangan-pandangan ini, kali ini saya agak senang dengan rapat raker kita, dengan Menteri perdagangan karena, yang disodorin ke kita ini ASEAN-Jepang dan Mozambik.

Kalau menurut saya pribadi, ini sebetulnya barang yang kita nggak perlu terlalu khawatir, malah harus segera kita raih karena di Jepang, saya punya beberapa teman Jepang yang udah pada pusing, penerus usaha-usaha mereka nggak ada. Jadi, kalau kita cerita ada pertukaran jasa, harusnya ini kesempatan emas untuk generasi muda kita malah bisa bekerja di sana, untuk menggantikan tenaga kerja mereka yang habis. Nah, memang mungkin yang perlu diperhatikan adalah kerjasama antara Kementerian Perdagangan dengan Kementerian lembaga yang lain untuk mempersiapkan tenaga kerja tersebut. Sebab, salah satu dari yang disampaikan Bu Evita itu sangat benar. Tenaga kerja medis itu sangat diperlukan oleh mereka, apalagi perawat-perawat orang-orang Jepang ini yang pada mulai berumur tua. Di hari tuanya, mereka perlu pendamping perawat. Nah, itu bisa kita kirim dan mendapatkan hasil yang cukup tinggi penghasilannya. Jadi, kalau soal perdagangannya antara Jepang dengan Indonesia, ini kan sudah barang tentu dari dulu juga mereka menjadi investor besar kita. Nah, kalau hari ini kita bisa kebut, dorong tenaga kerja kita untuk mengisi ke sana, itu menjadi sangat bagus dan mereka tentu sudah tahu budaya kita, mereka dulu jajah kita. Jadi, rasanya sih bisa cocok, gitu kan.

Nah yang kedua, untuk Mozambik ini juga menarik, ini menjadi penerobos kepada benua yang harus bisa kita raih. Dan, ya mohon maaf kata, kita juga yakin mereka bukan yang canggih-canggih produksi. Hari ini benar, mereka dijejelin ama produk-produk Cina. Nah, tentu ada ruangan untuk produk-produk Indonesia, rasa-rasanya mereka juga *resort rest area*, dimana mereka yang diekspor ya mirip-mirip kita aja lah. Nah, cuman yang menarik tadi dari penyampaiannya adalah mereka juga perlu mobil, beras, dan seterusnya, itu kan wilayah-wilayah yang kita bisa menonjol. Mudah-

mudahan, kita punya industrialisasi sedikit atau banyak lah lebih maju daripada Benua Afrika.

Nah, tentu ini yang harus saya sampaikan kepada teman-teman. Sebetulnya apa yang disampaikan oleh Pemerintah pada kesempatan hari ini adalah untuk kita ambil keputusan bagaimana kita akan membahas atau menyetujui ratifikasi ini dilakukan oleh Pemerintah melalui Perpres atau pun melalui pembahasan undang-undang. Saya sependapat juga, dengan apa yang disampaikan oleh Pak Menteri beserta jajarannya bahwa, bukan ini tidak berdampak luas, tapi tidak berdampak luas yang membebankan keuangan negara, dan memang dasar konstruksinya dari awalnya semua sudah dilakukan melalui Perpres.

Jadi, saya sih berpendapat, kita sebaiknya segerakan karena ini membuka peluang ekspor di masa pandemi ini, kita sama-sama udah dengar *Alhamdulillah* sudah mulai ada vaksin yang mulai datang. Nah, ini kan kita berburu untuk duluan pulih kesehatan ekonominya. Nah, kita tentu harapkan bahwa Kementerian Perdagangan bisa menjadi pejuang dan pelopor untuk peningkatan Ekspor kita. Mungkin dari saya seperti ini.

Kami beri kesempatan untuk Pak Menteri memberikan tanggapan. Kemudian, nanti kita putuskan dengan teman-teman, apakah kita bisa langsung setuju di rapat hari ini. Terima kasih. Silakan, Pak.

MENTERI PERDAGANGAN (AGUS SUPARMANTO):

Terima kasih, Pimpinan.

Bapak dan Ibu Anggota Komisi VI yang saya hormati,

Tadi Ibu Evita, terima kasih masukannya, Bu. Kita ini tidak luput dari kerjasama dan sinergi, dan ini sangat menginspirasi kita juga untuk bekerja lebih giat. Tadi meningkatkan SDM, ini skill-skill yang terutama khususnya perawat tadi tenaga medis, memang ini adalah peluang. Artinya, kita ini penduduknya besar 267 juta jiwa, dimana ini terbuka peluang atau sekitar 44% sektor jasa ke Jepang. Ini adalah salah satunya, nanti kita juga koordinasi, Bu dengan kementerian lain dalam meningkatkan kualitas SDM. Memang, salah satu program Presiden adalah untuk meningkatkan SDM.

Kemudian juga, nanti bagaimana kita memberikan mendapatkan solusi mengenai *barrier communication*, termasuk juga bahasa. Tapi, tadi yang dikatakan juga mengenai budaya ini kita ada benefit karena sudah ada, apa artinya sinergi mengenai budaya, dan itu mungkin itu Jepang juga cukup, cukup bagus. Selain itu juga, kita akan koordinasi juga berkaitan dengan hal ini, Menaker, BKPM dan juga Kemenlu untuk memperdalam berkaitan dengan kesempatan-kesempatan yang di, atau, memanfaatkan peluang ini, dalam perjanjian yang telah kita sepakati. Karena, ini merupakan peluang karena, kalau kita ternyata hanya tanda tangan, kita berbuat pasif, kita nggak akan pernah mendapat peluang ini. Nah, ini lah memang kita dorong, tidak hanya semua pelaku usaha maupun UMKM secara individu juga khususnya sehingga bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kemudian juga berkaitan dengan Mozambik, ini pasar non-tradisional. Ini juga, nanti juga akan kita lihat dengan negara-negara lain yang tadi usulan

dari Tunisia, Mauritius. Kami juga akan mengekspan, berkaitan dengan atase perdagangan kita dan ITPC, sebagai tangan kepanjangan kita, diprioritas yang saat ini tersebar di 31 negara dan 46 lokasi. Ini pun sesuai arahan Bapak Presiden, kita ini harus menjadikan *agent* bagi produk-produk Indonesia, sehingga kita bisa memasuki akses pasar khususnya, yang telah kita raih perjanjian-perjanjian kerjasama tersebut. Sekali lagi, Bu. Terima kasih.

Kemudian Bapak Tommy, berkaitan tadi juga mengenai kesiapan tenaga kerja, kita juga akan koordinasi dengan instansi terkait atau kementerian lain yang untuk mempersiapkan juga, bagaimana tenaga kerja salah satunya medis untuk kita siapkan, bisa kita masuk ke sektor jasa ini ke Jepang. Kemudian juga. produk-produk kompetitif baik UMKM. Nah, ini untuk meningkatkan daya saing, ini memang dalam program kita. Ya, khususnya nanti juga dalam waktu dekat, dalam program 2 tahun 2021 pun, kita ini program sangat intens dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Nah, antara lain, setelah kita juga memperkuat akses pasar, kemudian juga untuk meningkatkan desain, kemudian kualitas terhadap pelaku usaha khususnya UMKM, dan juga memfasilitasi pembiayaan modal.

Nah, ini salah satu program dan ini telah kita lakukan dalam beberapa waktu lalu. Bagaimana kita memfasilitasi bagi eksportir yang sudah siap untuk produknya mengekspor. Kemudian untuk meningkatkan salah satunya adalah memberikan, fasilitasi pembiayaan modal kerja bagi para eksportir. Tentunya, dengan bunga, bunga kredit yang cukup murah. Artinya, salah satu kalau memang limitnya kecil itu adalah kur dan juga ini sudah dilaksanakan kepada bank-bank Himbara, dan ini kita lakukan.

Kemudian, tadi sekali lagi terima kasih untuk masukannya. Memang, dalam protokol ini, nomor apa, salah satu yang terpenting adalah penguatan produk dalam negeri. Memang, sesuai dengan arahan Bapak Presiden, ini kita masih beberapa produk ekspor kita merupakan produsen terbesar, tapi ekspornya ini di bawah dengan ring-ring.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Pak, *mic* nya tolong dideketin dong. Saya nggak bisa dengar karena terlalu kecil.

MENTERI PERDAGANGAN (Agus Suparmanto):

Mohon maaf, Pak.

Terima kasih.

Jadi salah satunya adalah produk kopi. Kita produsen terbesar, tapi nomor 4, tapi ekspornya ini malah kita nomor 8. Nah, ini juga salah satu bagaimana kita peningkatan, penguatan produk dalam negeri. Terima kasih, Pak Tommy.

Kemudian, Pak Ananta. Bagaimana mengenai kemitraan ini, memang disini pengelolaan, perdagangan dalam negeri ini sedang kita perkuat. Khususnya, peningkatan kualitas dari produk itu sendiri, sehingga bisa dipasarkan. Kemudian juga, ini masukan yang sangat baik di *border*

perbatasan. Berkaitan dengan hal tersebut kita akan meningkatkan juga sarana perdagangan. Ya, memang ini *border-border* ini akan kita tingkatkan karena ini peluang. Jadi, negara-negara tetangga yang masuk melalui *border* juga di situ adalah peluang yang besar dan nanti kita sosialisasikan, bagaimana kita produk-produk yang kita bisa pasarkan dan ini akan disosialisasikan kepada UMKM, karena produk-produk tersebut potensial produk kita untuk dipasarkan di perbatasan. Sekali lagi, terima kasih, Pak Ananta.

Kemudian, Pak Deddy. Berkaitan dengan pemetaan yang lebih komprehensif, ini juga masukkan yang sangat baik, Pak. Kami akan membahas persiapan secara tertulis, Pak berkaitan dengan strategi dan kita akan *inline* juga dengan kementerian. Karena, ini penting koordinasi lintas sektoral ini juga bagaimana berkaitan, apakah nanti ada *support-support* program lain yang berkaitan dengan APBN. Karena juga, perjanjian ini akan dikawal, Ya. Untuk mengawal ini sesuai dengan bidangnya masing-masing, kita akan koordinasi dengan Kementerian dan lembaga lainnya.

Kemudian, Pak Arya Bima. Sekali lagi, terima kasih, Pak Deddy. Bapak Aria Bima, berkaitan dengan AJCEP, ini memang kita juga ada langkah-langkah konkrit berkaitan. Nah, berkaitan dengan siapa yang bertanggung jawab dengan program ini, nanti akan kami koordinasikan dengan Kementerian lain dan kita akan mendetailkan langkah konkrit supaya sekali lagi dengan perjanjian ini kita harus memaksimalkan peluang. Karena, kita tidak bisa cepat pasif dan harus agresif untuk mendapatkan peluang dan memanfaatkan peluang tersebut.

Kemudian juga, tadi mengenai kekuatan bagaimana kita bisa mendiplomasi, kami akan memanfaatkan itu, Pak. Berkaitan dengan kebutuhan misalnya, Jepang 30% energi dari batu bara dan gas, ini kita sebagai produsen batu bara dan juga gas. Nah, ini menjadikan dan kita akan memanfaatkan masukkan tersebut, Pak. Terima kasih. Kemudian juga, bagaimana ini korelasinya, tentunya yang positif bagi perjanjian perdagangan dengan Jepang ini. Nah, intinya dengan perjanjian kita ini harus ada *benefit*. *Benefitnya* adalah kita bisa mempunyai nilai tambah khususnya, untuk devisa kita dan nilai ekspor kita ke negara Jepang. Memang, Jepang ini sudah mitra lama dan kita harus juga tingkatkan juga komunikasi dan hubungan tersebut, tidak hanya bagaimana kita dalam, tapi juga investasi. Nah, investasi Jepang ini juga sudah melihat dan mereka akan tingkatkan juga investasi-investasi ke Indonesia. Dengan adanya perjanjian ini pun, ini akan menambah nilai positif dan nilai tambah bagi Indonesia. Terima kasih, Pak Aria Bimo.

Kemudian, Ibu Melani. Berkaitan tadi, untuk memanfaatkan perjanjian ini Mozambik, ya supaya, produk ekspor UMKM ini, produk UMKM ini bisa diekspor, ya sekarang kita juga mengakomodasi dengan UKM seperti misalnya, *furniture*, kemudian kopi atau kayu manis, ya dan ornamen kayu. Nah, ini kita akan, apa artinya, meningkatkan dan melakukan pembinaan terhadap UMKM, supaya produk ini juga meningkatkan nilai kualitasnya juga, terhadap khususnya desain tadi. Kemudian juga, bagaimana memfasilitasi permodalan supaya bisa meningkatkan volumenya, ini bisa juga tadi ada karung bahan tekstil. Nah, intinya juga tadi perjanjian ini kita harus tingkatkan sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, khususnya. Karena, memang tujuannya itu perjanjian negara lain, ini harus memberikan nilai positif dan juga dengan adanya ini, memang kita akan koordinasi dan

dengan kementerian dan lembaga lain, supaya bisa maksimal peluang-peluang ini kita manfaatkan. Ada juga memang, bagaimana program-program peningkatan bagi eksportir-eksportir kita juga.

Tadi saya sudah katakan pembinaan-pembinaan tersebut jika kita lakukan, bagaimana *coaching* program bagi eksportir. Ini sudah kita lakukan, tapi juga kita akan tambah lagi dengan adanya peluang ini, otomatis kembali lagi tadi SDM juga ini akan menambah nilai yang baik bagi kita semua, khususnya ini peluang-peluang bagi para pelaku usaha, tidak hanya yang sudah ada maupun ini yang baru, dan kita menginformasikan juga bagaimana produk-produk saja, apa saja yang dibutuhkan dan berpotensi, karena saya lihat juga memang ini perlu dimaksimalkan karena ini peluangnya negara tersebut mengimpor dari beberapa negara dan ini kita akan tingkatkan melalui program *coaching*, program untuk eksportir-eksportir. Terima kasih, Bu Melani.

Kemudian, Bu Nevi. Jadi, keterlibatan UMKM ini, dampak *pandemic* ini memang, kita akan terus membantu dan juga menggiatkan, apa, mendorong mereka. Dan juga kita sekali lagi, semua kementerian dan terkait ikut serta jadi, dalam khususnya, untuk mengkoordinasi. Misalnya, dalam program untuk kunjungan maupun promosi, ini juga ada delegasi RI. Ini semua yang baik dalam hal ini, kementerian dan lembaga lainnya ini menjadikan ikut serta dalam keanggotaan, bagaimana kita untuk mendapatkan peluang-peluang tersebut.

Kemudian juga, kita akan meningkatkan jasa strategis, ya. Ini sekali lagi, ini peluang untuk meningkatkan SDM. Supaya kita siap. Karena, saat ini peluang ada, tenaganya ada, tapi kesiapan dari tenaganya ini yang memang mungkin jadi tantangan kita. Namun, ini tidak bisa instan, masih kita dalam proses peningkatan kualitas SDM ini. Kita kerjasama juga, tadi sekali lagi dengan Kementerian-Kementerian yang terkait. Dan terima kasih, Bu Nevi.

F-PKS (Hj. NEVI ZUARIANA):

Terima kasih, Pak Menteri.

MENTERI PERDAGANGAN (AGUS SUPARMANTO):

Kemudian, Pak Andre. Terima kasih atas tanggapannya, dan ratifikasi ini memang diperlukan. Karena, sudah di depan mata kita, ini kalau di tanda tangan memang akan berdampak segera terhadap peluang-peluang bisnis yang bisa dimanfaatkan oleh para pelaku usaha kita. Terima kasih, Pak Andre.

Kemudian, Pak Baidowi. Terima kasih. Proses alih teknologi, ini memang kita juga menekankan, proses alih teknologi ini bagi, khususnya bagi pelaku usaha karena dengan adanya kerjasama ini, otomatis peluang untuk pelaku usaha juga harus menjadikan kesiapan sehingga meningkatkan daya saing. Karena, juga ada beberapa negara juga, akan mendapatkan apa akses pasar. Namun, dengan adanya perjanjian ini, kita lebih diprioritaskan, karena ada kelebihan-kelebihan seperti mengenai tarif-tarif tadi. Dan ini sekali lagi, kenapa kita harus mensosialisasikan dan memanfaatkan peluang ini, dan sebagai dasar untuk bagi para pelaku usaha, sehingga meningkatkan ekspor ini lebih, lebih baik dengan memanfaatkan fasilitas perjanjian antara lain, tarif. Perlu diketahui dengan adanya penandatanganan ini, kita lebih, lebih

menguntungkan dari negara-negara yang tidak mempunyai perjanjian. Terima kasih, Pak.

Kemudian, Pak Pimpinan. Pak Haekal. Berkaitan dengan tenaga medis, tadi udah saya katakana, memang ini sangat menarik karena *culture* sudah, Jepang ini memang sudah boleh dibilang sudah suka dengan orang-orang Indonesia yang lihat pekerjaannya, mereka secara *culture* juga cepat menyesuaikan dan ini peluang memang, bagi penduduk Jepang ini cukup besar ya bagi-bagi peluang tenaga kerja medis. Ya memang, mereka tenangnya yang untuk hal-hal tersebut memang kurang. Nah, untuk itulah kita mempunyai peluang. Nah, ini kembali lagi tadi, saya akan koordinasikan bagaimana untuk meningkatkan sumber daya manusianya dan mempersiapkannya, supaya bisa meraih peluang itu, sektor jasa ini ke Jepang.

Berkaitan dengan Mozambik, memang sedang kita tingkatkan program tadi bagaimana, ini sudah ada tim tadi yang udah saya bentuk, mengenai tim memanfaatkan perjanjian kerjasama ini sehingga peluang-peluang produk yang belum terjamah atau bahkan perlu ditingkatkan secara signifikan pun bisa disosialisasikan, bisa mendapatkan informasi lebih detail, sehingga sampai kepada, informasi ini bisa sampai kepada para pelaku usaha. Sehingga, mereka bisa memanfaatkannya.

Terima kasih, Pak. Itu sampai yang hal-hal yang sudah saya sampaikan. Nanti, apabila ini agak kurang, kami jawab secara tertulis.

Terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Baik. Terima kasih atas tanggapannya.

Ini dari teman-teman masih. Udah cukup ya, sesi tanya jawabnya. Disini kita harus dari apa yang saya bisa simpulkan, dari apa yang disampaikan oleh teman-teman, rasanya kita bisa langsung menyampaikan kesimpulan aja pada hari ini, kalau teman-teman setuju yaitu kita untuk menyetujui dan kemudian kita meminta pemerintah untuk menyelesaikannya melalui mekanisme Peraturan Presiden, sebagaimana tadi disampaikan oleh banyak teman-teman.

Lalu, tentunya kita minta, Pak Menteri untuk menindaklanjuti ini dan mungkin menyampaikan rencana aksinya dan tentunya, nantinya progres kegiatannya ke depan. Karena ini agak menarik, kalau memang Mozambik sudah bisa menjadi jalur pembuka kita untuk ke benua itu, itu kan kita tahu mereka adalah benua yang sama seperti Indonesia, kaya akan *natural resources*. Nah, duitnya ini harus kita manfaatkan, buat pertumbuhan perekonomian kita.

Saya usul langsung ke draft kesimpulan, ya. Setuju ya, langsung?

F-P.GERINDRA (ANDRE ROSIADE) :

Setuju.

KETUA RAPAT:

Baik.

Kami bacakan, draf kesimpulan. Mana. Baik. Beberapa kesimpulan Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perdagangan terkait pengesahan protokol pertama untuk mengubah persetujuan tentang Kemitraan Ekonomi Menyeluruh antara Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara dengan Jepang/ *First Protocol to Amend The Agreement and Comprehensive Economic Partnership among Member States of The Association of Southeast Asian Nations and Japan* dan Persetujuan Perdagangan *Preferential* antara pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Mozambik/ *Preferential Trade Agreement between The government of the Republic of Indonesia and The Government of The Republic Mozambique*. Selasa 8 Desember 2020:

1. Komisi VI DPR RI menyetujui, pengesahan protokol pertama untuk mengubah persetujuan tentang Kemitraan Ekonomi Menyeluruh antara Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Jepang/ *First Protocol to Amend The Agreement and Comprehensive Economic Partnership among Member States of The Association of Southeast Asian Nations and Japan* dan Persetujuan Perdagangan *Preferential* antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Mozambik/ *Preferential Trade Agreement between The Government of The Republic of Indonesia and the Government Republic of Mozambique*.

ini dapat disetujui? Setuju ya? Baik.

(RAPAT:SETUJU)

2. Komisi VI DPR RI menyetujui melalui mekanisme Peraturan Presiden terkait pengesahan protokol pertama untuk mengubah persetujuan tentang Kemitraan Ekonomi Menyeluruh antara Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Jepang/ *First Protocol to Amend The Agreement and Comprehensive Economic Partnership among Member States of The Association of Southeast Asian Nations and Japan* dan Persetujuan Perdagangan *Preferential* antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Mozambik/ *Preferential Trade Agreement between The Government of The Republic of Indonesia and the Government Republic of Mozambique*.

Dapat di setujui ya? Gimana Bu?

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc):

Kalimatnya. Komisi VI DPR RI menyetujui melalui mekanisme, menyetujui pengesahan.

KETUA RAPAT:

Pengesahan, betul. Ini hebat ini, ga pake fatwah aja masih bisa diperbaiki. Pengesahan ini

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Jadi melalui mekanisme itu di belakang.

KETUA RAPAT:

Ya. Jadi menyetujui pengesahan.

F-PKB (Drs. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.):

Sudah kita delegasikan Bu Evita, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Masya Allah, hadir ya, Pak Toha. Ini kangen Bapak ga disini nih. Sebenarnya ga ada temen ngeroko nih. Dibelakang Mozambik, itu kaya nomor 1 tapi. Melalui. Ya. Di akhir itu.

Nah. Jadi, kita harus baca ulang lagi nih. Oke. Makasih Bu Evita. Saya baca ulang ya. Nomor

3. Komisi VI DPR RI menyetujui, pengesahan protokol pertama untuk mengubah, protokol pertama untuk mengubah persetujuan tentang Kemitraan Ekonomi Menyeluruh antara Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Jepang/ *First Protocol to Amend The Agreement and Comprehensive Economic Partnership among Member States of The Association of Southeast Asian Nations and Japan* dan Persetujuan Perdagangan *Preferential* antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Mozambik/ *Preferential Trade Agreement between The Government of The Republic of Indonesia and the Government Republic of Mozambique*.

Melalui mekanisme Peraturan Presiden. Setuju ya?

(RAPAT:SETUJU)

F-PDIP (ARIA BIMA):

Pimpinan. Pak Haekal.

KETUA RAPAT:

Ya, Pak.

F-PDIP (ARIA BIMA):

Terkait karena ini perluasannya adalah terkait jasa, saya mengusulkan satu kesimpulan yang saya WA, ke WA-nya Pak Haekal. Dijadikan draft.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Saya buka WA dulu. Bentar-bentar. Ini siapa tau nyambung sama yang ini.

F-PDIP (ARIA BIMA):

Menyangkut SDM, karena. Jadi uraiannya, persoalan teknologi dan SDM sekarang ini menjadi perhatian khusus kita juga, Pak. Kalau infrastruktur memang sudah cukup kita bisa kejar, tapi kalau masalah SDM dan.

KETUA RAPAT:

Bapak tolong dengar dulu. Ini yang nomor 3. Ini mungkin bisa kita masukin disini sekalian nih atau ya kalau perlu kita tambahkan 1 poin. Saya selesaikan dulu.

3. Komisi VI DPR RI meminta, Menteri Perdagangan untuk menyampaikan rencana aksi tindak lanjut dari Peraturan Presiden, ini tentunya kalau sudah terbit nanti ya, tentang pengesahan protokol pertama untuk mengubah persetujuan tentang Kemitraan Ekonomi Menyeluruh antara Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Jepang/*First Protocol to Amend The Agreement and Comprehensive Economic Partnership among Member States of The Association of Southeast Asian Nations and Japan* dan Persetujuan Perdagangan *Preferential* antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Mozambik/ *Preferential Trade Agreement between The Government of The Republic of Indonesia and the Government Republic of Mozambique*.

Jadi, ini bicaranya tentang *action plan* setelah **(suara terputus-putus)** ini. Tapi, ini ada saran dari Pak Bimo nih. Saya bacakan aja. Komisi VI DPR RI meminta kepada Kementerian Perdagangan untuk mengkoordinasikan dengan Kementerian lainnya terkait peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia Indonesia, agar dapat berkompetisi dengan negara-negara lain akibat disetujuinya perjanjian-perjanjian ini. Ini mungkin poin keempat kali ya. Baik. Baik Pak Bimo.

F-PDIP (ARIA BIMA):

Makasih.

KETUA RAPAT:

Baik. Itu nanti kalimatnya bisa diselesaikan. Kita ketok nomor 3 dulu. Setuju ya. Dapat di setujui, ya?

(RAPAT:SETUJU)

Baik. Oke. Nomor

4. Komisi VI DPR RI meminta kepada Kementerian Perdagangan, untuk mengkoordinasikan dengan Kementerian lainnya terkait peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia Indonesia agar dapat berkompetisi.

Nah ini bisa kita tambah ini, ada usulan dari Pak Tommy dan juga UMKM. Mungkin ada komanya itu, setelah ini setelah.

F-PDIP (ARIA BIMA):

SDM.

KETUA RAPAT:

Setelah SDM, mau UMKM sendiri boleh. Enggak saya takut, tiba-tiba disuruh baca ulang itu tadi judul-judul yang panjang itu loh. Ampe berbusa ini mulut ngomongnya.

F-PDIP (ARIA BIMA):

Kita jadikan perjanjian ini aja, Pak.

KETUA RAPAT:

Kita khususkan untuk ini. Pak Menteri setuju ya? Semua setuju.

“Komisi VI DPR RI meminta kepada Kementerian Perdagangan RI, untuk mengkoordinasikan dengan Kementerian lainnya terkait peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia Indonesia agar dapat berkompetisi, berkompetisi, itu salah itu ya. Bener ya. Kompetisi dengan negara lain akibat disetujuinya perjanjian ini”.

Setuju ya?

(RAPAT:SETUJU)

Oke. Baik. Kebetulan Menteri Tenaga Kerja nya juga PKB kalau ga salah. Nomor

5. Komisi VI DPR RI meminta kepada Kementerian Perdagangan RI, untuk meningkatkan, silakan Pak Tommy, meningkatkan ini ya,

F-PKB (TOMMY KURNIAWAN):

Besinergi dengan lembaga atau Kementerian lain untuk meningkatkan kualitas produk dalam negeri atau UMKM. Eh, dan produk dalam negeri dan juga pemanfaatan UMKM.

KETUA RAPAT:

Itu judulnya ini ya. Kompetensi dan penguatan UMKM mungkin biar ga terlalu.

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc):

Kalau kita ga terlalu berkaitan dengan materi yang kita bahas, itu keinginan Pak Jokowi itu UMKM *go digital*. Kan itu sebenarnya. *Go global*, UMKM *go digital and go global*. Nah ini, yang bagaimana kita menginginkan akibat dari perjanjian ini, UMKM Kita juga bisa *go global* gitu.

KETUA RAPAT:

Jadi, kalimatnya. Saya senang deh, kalau kita kasih ide terus kita rumusin kalimat gitu kan.

F-PKB (TOMMY KURNIAWAN) :

Penguatan produk UMKM.

KETUA RAPAT:

Meningkatkan kompetensi dan penguatan produk UMKM Indonesia.

F-PKB (TOMMY KURNIAWAN):

Untuk pasar global.

KETUA RAPAT:

Untuk siap bersaing di pasar global. Mungkin Pak dari Kementerian ada perlu perbaikan kalimat? Atau sudah cukup? Udah cukuplah ya.

5. Komisi VI DPR RI meminta kepada Kementerian Perdagangan RI, untuk bersinergi dengan kementerian dan lembaga lain, untuk meningkatkan kompetensi dan penguatan produk UMKM Indonesia sehingga, mampu bersaing di pasar global.

Setuju ya?

(RAPAT:SETUJU)

Oke. Baik.

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc):

Sebelum diputus, Pak. Sebelum ditutup. Saya hanya menyampaikan pesan kepada Pak Menteri. Pak Menteri, tolong difokuskan, diprioritaskan untuk kerjasama kita dengan negara Afrika. Kenapa? Selama ini kan hubungan kita tuh hanya hubungan politik dari Konferensi Asia-Afrika yang sudah lama itu terjalin hubungan politik. Dari Konferensi Asia-Afrika yang sudah lama, itu terjalin hubungan politik. Bagaimana sekarang kita membuka hubungan ekonomi dengan mereka, begitu Pak. Jadi, tolong ini di prioritaskan, Pak Menteri.

Terima kasih.

MENTERI PERDAGANGAN (AGUS SUPARMANTO):

Terima kasih, Bu Evita.

KETUA RAPAT:

Oke. Baik.

F-PDIP (ARIA BIMA):

Tambahan, Pak Pimpinan.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRİ HANTERU SITORUS, M.A.):

Saya itu ga pakai baju merah betul, makanya agak lembut.

KETUA RAPAT:

Lagi agak *pink* hari ini.

F-PDIP (ARIA BIMA):

Tambah, Pak Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik, Pak Bimo silakan nih, sebelum penutup.

F-PDIP (ARIA BIMA):

Bapak Menteri, seperti tadi saya sampaikan, mengenai tiba-tiba perjanjian lagi, tiba-tiba perjanjian lagi yang disodorkan di Komisi VI. Maka, di dalam rapat-rapat, saya kira Pak Menteri terus sampaikan tentang pemanfaatan utilisasi perjanjian perdagangan internasional, Pak Menteri baik yang *bilateral* maupun yang *multilateral* oleh Indonesia. Apakah sudah maksimal atau masih rendah. Nah, ini kita, kita belum tahu, nanti pas setelah *recovery* covid ini kita perlu. Apalagi, dampak dari covid ini kan akan ada *booming* impor barang yang *ter-pending* selama covid, yang kita harus kita sikapi supaya kita tidak bisa seimbang. Sesuai dengan kebutuhan kita, jangan sampai pasca covid ini jadi *tsunami* barang-barang impor, karena *recovery* dari masing-masing negara itu akan mem-*placement* barangnya sesuai dengan kepentingan pasar yang mungkin sangat jauh kita kompetitifnya harga yang sangat murah, ini yang saya kira penting, maka implementasi perjanjian perdagangan internasional dengan negara lain khususnya, ASEAN, China, Jepang itu perlu sekali tetap dalam konteks tadi pemanfaatan utilisasi perjanjian dalam kaitan peningkatan ekspor kita, Pak. Termasuk di sektor jasa dan sektor investasi. Ini yang menurut saya penting untuk kita mendapatkan informasi untuk rapat-rapat berikutnya, perlu disandingkan negara-negara mana yang sudah kita ikut perjanjian. Dan sekali lagi pasca covid ini nanti setelah, setelah vaksin yang sudah ditemukan, saya ada kekhawatiran itu dan jangan karena alasan perjanjian, kemudian kita kebanjiran berbagai barang termasuk jasa ke kita.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik. Terima kasih, Pak Bimo.

Nanti mungkin pada masa sidang yang akan datang, mudah-mudahan sebagian daripada suntik-menyuntik vaksin ini udah berjalan, mungkin ada baiknya juga itu Pak Menteri menyiapkan, dengan Pak Wamen juga, *roadmap* mengenai perjanjian dagang yang mungkin tahun ini banyak tertunda dan seterusnya, supaya kita bisa *track on track* gitu.

Baik.

Terima kasih. Ini sebelum kita tutup, sebagaimana lazimnya kita berikan kesempatan untuk Pak Menteri Perdagangan, apabila ada yang mau disampaikan sebagai kata penutup. Kalau nggak, ya ga pa pa. Kalau ada, ya kami persilahkan.

MENTERI PERDAGANGAN (AGUS SUPARMANTO):

Terima kasih, Bapak Pimpinan.

Tadi juga terima kasih masukan dari Pak Ario Bimo. Mungkin, nanti rapat-rapat berikutnya kita akan memaparkan pemanfaatan atau implementasi dari perjanjian-perjanjian yang sudah berjalan.

Bapak Pimpinan,

Ketua dan wakil ketua Komisi VI,
Bapak Ibu Anggota Komisi VI yang terhormat.

Saya mengucapkan terima kasih atas seluruh dukungannya, masukan-masukan ini sangat bermanfaat dan ini menjadikan juga kita untuk bersinergi, terhadap Kementerian lain supaya mengingatkan juga bagaimana meningkatkan ekspor kita. Perjanjian ini memang manfaatnya bagaimana produk-produk kita bisa masuk ke pasar global.

Sekali lagi, terima kasih atas dukungannya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ini kan sudah nggak perlu di kita lagi. Oh ya. Kita tinggal sidang dua hari lagi disini. Ga tau. Kesempatan daripada ini. Ya.

Bapak Ibu dan hadirin yang kami muliakan,

Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Menteri Perdagangan beserta jajarannya.

Atas nama pimpinan Komisi VI DPR RI, kami menyampaikan menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh Saudara-saudara Anggota Komisi VI, baik yang hadir dan yang virtual dan para undangan yang ikut hadir pada kesempatan hari ini.

Demikian.

Kami tutup Rrapat ini dengan ucapan hamdalah, *alhamdulillah rabbil'alamin*.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 12.52 WIB)

Jakarta, 8 Desember 2020
a.n KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

Ttd.

DEWI RESMINI, S.E., M.Si
NIP.197104071992032001